



# LAPORAN KINERJA

## Tahun 2022

Direktorat Kursus dan Pelatihan



KursusKita



Direktorat Kursus dan Pelatihan



@kursuskita



@kursuskita



kursus.kemdikbud.go.id

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan tahun 2022. Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2022 menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja. Secara umum Direktorat Kursus dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya Laporan Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2022.

Jakarta, 26 Januari 2023

Direktur Kursus dan Pelatihan



Dr. Wartanto

## Daftar Isi



2	Kata Pengantar
3	Daftar Isi
4	Ikhtisar Eksekutif

### BAB I – Pendahuluan

9	A. Gambaran Umum
9	B. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
9	C. Dasar Hukum
12	D. Isu Strategis dan Peran Strategis



### BAB II – Perencanaan Kinerja

15	Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi
----	-----------------------------------



### BAB III – Akuntabilitas Kinerja

21	A. Capaian Kinerja
110	B. Realisasi Anggaran
112	C. Inovasi dan Program <i>Collaborative</i>



### BAB IV – Penutup

133	Kesimpulan
134	Upaya yang Dilakukan

### Lampiran

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

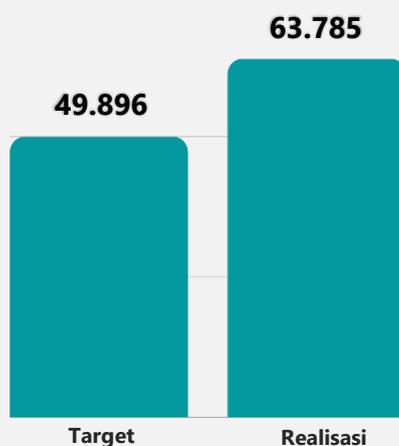
### SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Lulusan Kursus dan Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

#### IKK 1.1

Jumlah **anak** usia sekolah **tidak sekolah** yang mendapatkan **pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha**

127,83%



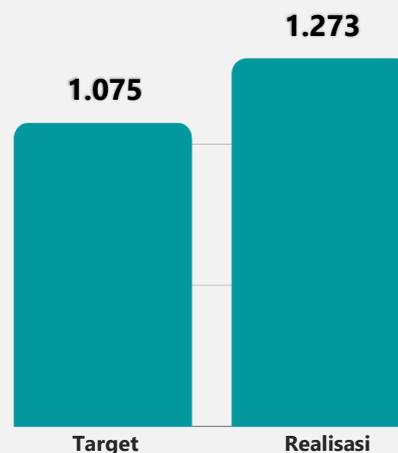
### SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

#### IKK 2.1

Jumlah **satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan** yang menerapkan pembelajaran **sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja**

118,41%



**SASARAN KEGIATAN 3**

**Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kursus Dan Pelatihan**

**IKK 3.1**

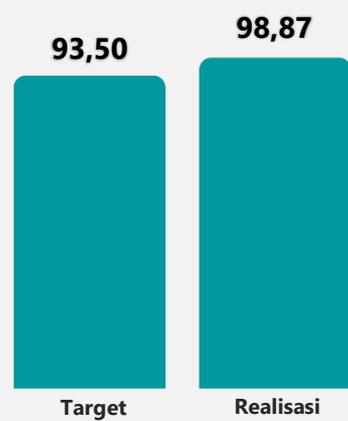
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**) Direktorat Kursus dan Pelatihan

**83,75**

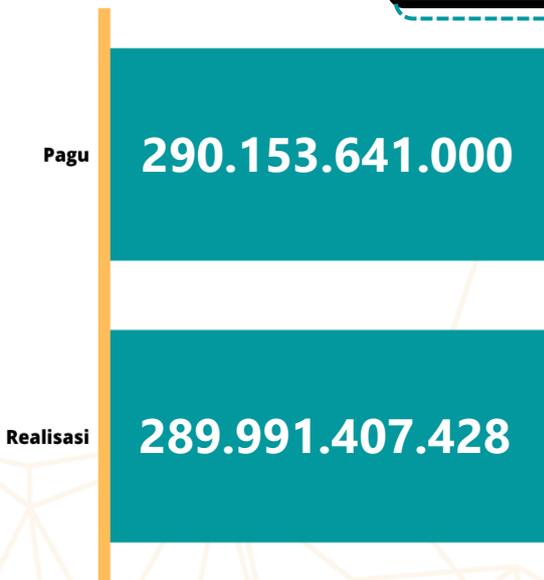


**IKK 3.2**

**Nilai Kinerja Anggaran** atas pelaksanaan RKA -K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan



**Kinerja Keuangan**



**Presentase Kinerja Keuangan**

**99,94%**



## KENDALA/PERMASALAHAN

1

Masih terbatasnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kursus dan pelatihan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2

Pasca pandemi covid 19, lowongan pekerjaan di beberapa sektor masih terbatas bagi *entry level* yang menjadi sasaran program PKK pandemi covid-19 di beberapa bidang keterampilan

3

Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti DUDIKA, Perguruan Tinggi, dan K/L terkait dalam program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) sehingga pelaksanaan program menjadi kurang fokus, integratif, efisien dan efektif

4

Ada keterlambatan dalam penetapan penerima bantuan PKK dan PKW karena menunggu proposal dari daerah afirmasi

5

Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi



## UPAYA YANG DILAKUKAN

1

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop* dan seminar baik secara luring, daring maupun *hybrid* tentang peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pendampingan kursus dan pelatihan program

2

Mengembangkan kemitraan dengan DUDIKA dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop*, seminar, DUDIKA *gathering*, meningkatkan keterlibatan aktif DUDIKA dan proses belajar mengajar, tempat magang, pendampingan dan penyerapan lulusan

3

Meningkatkan koordinasi dengan DUDIKA, Perguruan Tinggi dan K/L terkait dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop* dan seminar serta pemberian penghargaan baik secara luring, daring maupun *hybrid* tentang program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) serta peran dan bentuk kerjasama apa saja yang bisa dilaksanakan bersama agar program kursus dan pelatihan menjadi lebih fokus, integratif, efisien dan efektif

4

Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dengan daerah afirmasi secara daring untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam mengakses program PKK dan PKW

5

Menyusun analisis dan rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi *online* berbasis teknologi informasi agar bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program serta penyesuaian dan pengembangan fitur secara periodik



# BAB I

## Pendahuluan



## SEJARAH

Direktorat Kursus dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja pada Ditjen Pendidikan Vokasi. Sesuai dengan Permendikbudristek No. 28/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Kursus dan Pelatihan pertama kali dibentuk pada April 2006 lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 43/2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Wilayah kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan melingkupi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

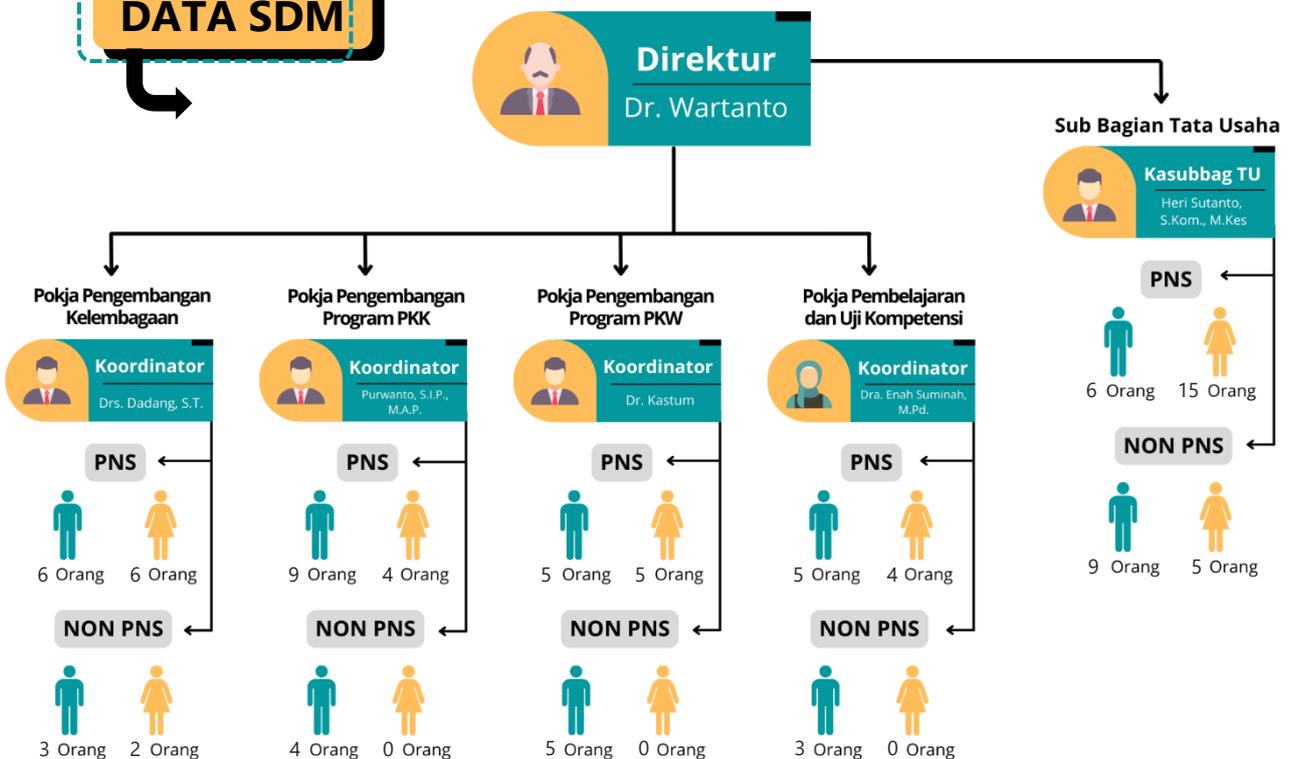
## TUGAS



Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja

(Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021)

## DATA SDM



Total Pegawai Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun 2022



**103**  
Pegawai

\*Sumber: Data SDM Direktorat Kursus dan Pelatihan Desember, Tahun 2022

**FUNGSI**

- 1 ● Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 2 ● Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 3 ● Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 4 ● Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 5 ● Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 6 ● Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 7 ● Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing
- 8 ● Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
- 9 ● Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat



## DASAR HUKUM

1

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

4

Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek

5

Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

6

Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



## Isu Strategis

### Akses Kerja Lulusan di DUDIKA

Lulusan kursus dan pelatihan perlu direkognisi secara lebih luas di DUDIKA

### Kualitas Penyelenggaraan Kursus & Pelatihan Berstandar DUDIKA

Sebagian penyelenggaraan kursus dan pelatihan belum didukung dengan kualitas instruktur, pengelola, dan sarana praktik yang memiliki kualifikasi sesuai standar DUDIKA

### Rekognisi Lulusan di Pendidikan Formal

Membuka akses bagi lulusan kursus dan pelatihan untuk melanjutkan pendidikan ke SMK dan PT melalui Program RPL

### Rekognisi Sertifikat di DUDIKA

Sertifikat hasil penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan kursus dan pelatihan belum semua direkognisi oleh DUDIKA

### Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Mendorong Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kualitas kursus dan pelatihan di wilayah masing-masing

### Transformasi LKP menjadi Perguruan Tinggi Vokasi

Memfasilitasi LKP yang memenuhi persyaratan menjadi perguruan tinggi vokasi dalam bentuk akademi komunitas, akademi atau politeknik. Mendorong LKP terutama yang berpengalaman dalam penyelenggaraan program kursus 1 tahun dan 2 tahun untuk menyelenggarakan (1) pendidikan tinggi vokasi (*degree*) dan sekaligus juga (2) program kursus dan pelatihan (*non degree*). Hal ini memperlebar pilihan komparatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kompetensi bekerja atau berusaha sekaligus melanjutkan studi ke perguruan tinggi.



## Peran Strategis

1

Memfasilitasi keterbukaan akses informasi kerja bagi para lulusan kursus dan pelatihan

2

Meningkatkan kualitas instruktur, pengelola, dan sarana praktik agar sesuai dengan standar DUDIKA

3

Sinkronisasi kualifikasi lulusan kursus dan pelatihan dengan pendidikan formal di SMK dan perguruan tinggi vokasi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau

4

Menjadi fasilitator dalam membangun koordinasi antara Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan DUDIKA untuk meningkatkan penjaminan mutu lulusan kursus dan pelatihan yang bersertifikasi sesuai kebutuhan DUDIKA

5

Membangun jejaring melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membangun bersama pendidikan vokasi non formal melalui kursus dan pelatihan baik melalui APBD II, CSR dari DUDIKA di wilayah masing-masing maupun anggaran lainnya

6

Melakukan bimbingan teknis & pendampingan bagi LKP yang akan diproyeksikan untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi vokasi (Akademi Komunitas/ Akademi / Politeknik) bersama dengan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Vokasi



# BAB II

## Perencanaan Kinerja



*Membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup, yang unggul, terus berkembang, terampil, mandiri, berkarakter, profesional, dan berdaya saing*

**Visi**

\*Renstra Periode Tahun 2020 – 2024

**Misi**



Meningkatkan akses layanan kursus dan pelatihan bagi peserta didik dari anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), menganggur dan berasal dari keluarga kurang mampu

Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan yang kreatif dan berkarakter

Meningkatkan layanan lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas

Mewujudkan tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan yang transparan dan akuntabel

**1**

Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA

**2**

Penguatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan DUDIKA

**3**

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan



**Tujuan**



## Rencana Kinerja

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2022 dan Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja kegiatan yang dijelaskan secara rinci melalui tabel di bawah ini:

Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Base line	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>SK : Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</b>									
IKK 2.6.3.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70.385	17.164	85.000	100.000	88.661,00	419.435,00	494.555,00
<b>SK : Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</b>									
IKK 2.6.3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	974	1.075	1.794	2.430	12.157,00	40.908,00	53.917,00
<b>SK : Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan</b>									
IKK	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

## Perjanjian Kinerja (Awal)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2022
1	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	<b>17.164</b>
2	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	<b>1.075</b>
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	IKK 3.1	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>A</b>
		IKK 3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>93,5</b>

## Alokasi Anggaran

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 24.895.875.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 100.818.410.000

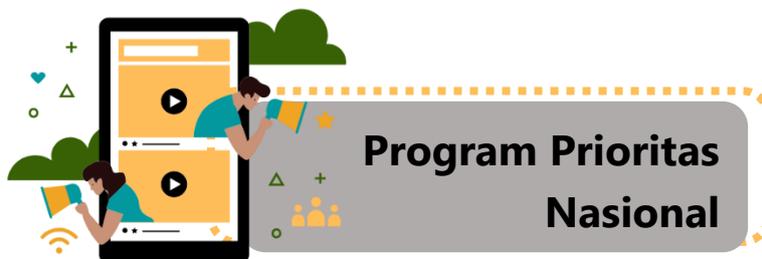
Pada tahun 2022 dilakukan revisi pada target sasaran kegiatan 1 yaitu meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Faktor yang mempengaruhi adanya perubahan target ini karena adanya relokasi BA-BUN yang dipergunakan untuk realisasi program prioritas seperti PKK dan PKW. Adanya tambahan anggaran ini, mempengaruhi capaian realisasi jumlah peserta didik yang mengikuti Program PKK dan PKW oleh karena itu target Perjanjian Kinerja direvisi dan disesuaikan dengan proyeksi tambahan anggaran.

## Perjanjian Kinerja (Akhir)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2022
1	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	<b>49.896</b>
2	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	<b>1.075</b>
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	IKK 3.1	Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>A</b>
		IKK 3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	<b>93,5</b>

## Alokasi Anggaran

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 23.353.120.000
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 266.800.521.000



Pada periode tahun 2020-2024, Direktorat Kursus dan Pelatihan memiliki dua program prioritas nasional, yaitu:

# 1

**Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)**

# 2

**Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)**

**Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)** adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di Dunia Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja lainnya.

**Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)** adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program pendidik dan kecakapan hidup untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berwirausaha. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan salah satu **Major Project (MP)** yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja



## SASARAN STRATEGIS



### Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

Untuk mendukung kinerja Kemendikbudristek, khususnya terkait sasaran strategis meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang, Ditjen Pendidikan Vokasi mengemban tugas untuk memastikan tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan vokasi setelah 1 tahun kelulusan dengan upah minimum 1x UMP semakin meningkat.

Sebagai bagian dari Ditjen Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan berkontribusi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen Pendidikan Vokasi terkait peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya lulusan kursus dan pelatihan.

Tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah menetapkan tiga sasaran kegiatan yang akan dicapai, sesuai Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan, dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian
1 Meningkatkan lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 1.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	17.164	63.785	371,62%
2 Meningkatkan lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKK 2.1 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.075	1.273	118,41%
3 Meningkatkan tata kelola Direktorat	IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A	A	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022	% Capaian
Kursus dan Pelatihan	IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	93,5	98,87	105,74%

Pada tahun 2022, dilakukan revisi pada target Perjanjian Kinerja di Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia karena adanya relokasi BA-BUN yang dipergunakan untuk realisasi program prioritas seperti PKK dan PKW. Adanya tambahan anggaran ini, mempengaruhi capaian realisasi jumlah peserta didik yang mengikuti Program PKK dan PKW sehingga target di tahun 2022 di Sasaran Kegiatan 1 direvisi menjadi 49.896 orang melalui Perjanjian Kinerja dan telah disesuaikan dengan proyeksi tambahan anggaran.



**S**asaran Kegiatan meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak tidak sekolah mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan sehingga anak tidak sekolah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.

Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat menjangkau 41.722 anak tidak sekolah untuk mengikuti Pendidikan Kecakapan Kerja, dan 22.063 anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

Pada program PKK, dari 41.722 yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, ada 21.220 orang yang telah bekerja (data per 25 Januari 2023) atau presentase serapan lulusan ke dunia kerja adalah sebesar 50,86%. Sedangkan dari 20.063 orang yang mendapatkan bantuan dalam program PKW, 19.552 (data per 25 Januari 2023) orang memulai wirausaha atau presentase serapan lulusan yang berwirausaha adalah sebesar 88,62%. Dan angka presentase serapan lulusan PKK dan PKW ini terus berkembang seiring dengan dengan terserapnya lulusan program PKK dan PKW di DUDIKA.

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan yakni jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### IKK 1.1

**Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha**

<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
<b>49.896 Orang</b>	<b>358.585 Orang</b>
<b>CAPAIAN 2022</b>	<b>% CAPAIAN RENSTRA</b>
<b>63.785 Orang</b>	<b>61,43%</b>

Capaian **Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha** didukung oleh dua output yakni Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKK adalah Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), usia antara 17 s.d. 25 tahun yang

masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sedangkan kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKW adalah Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS), usia antara 15 s.d. 25 tahun yang masih menganggur, diutamakan dari keluarga tidak mampu atau pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### Metode Penghitungan

$$I = A + B$$

#### Keterangan

- **I** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha,
- **A** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja
- **B** : Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan wirausaha
- Satuan : Orang
- Tipe Penghitungan : Nonkumulatif
- Unit Pelaksana : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Sumber Data : Dapodik, <http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id>, laporan pelaksanaan PKK dan PKW
- Periode Pengumpulan Data : Tahunan

## Capaian

Tingkat capaian pada IKK didukung oleh dua program yaitu PKK dan PKW. Program PKK dan PKW yang menjadi pendukung dalam IKK ini di tahun sebelumnya masuk ke dalam IKK 3 - Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Fasilitas Berstandar Industri sehingga di tahun ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan pada rencana strategis satuan kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Adapun di tahun 2022 capaian pada IKK ini sebesar 63.785 orang. Hasil ini melampaui target awal yaitu 49.896 orang dan presentase capaian pada IKK ini di tahun 2022 adalah 127,83%. Adapun hambatan/kendala beserta langkah strategis yang dilakukan dalam ketercapaian IKK ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

## Hambatan/Kendala

1. Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program PKK tepat waktu
2. Terjadi keterlambatan penetapan tahap akhir karena menunggu daerah afirmasi
3. Untuk PKK, Terdapat lulusan PKK yang sudah menyelesaikan pembelajaran hingga ujian kompetensi namun belum terserap di dunia kerja secara optimal karena terbatasnya lowongan pekerjaan di beberapa bidang keterampilan bagi para pekerja pemula (*entry level*) yang menjadi sasaran program PKK sebagai dampak pandemi covid 19
4. Untuk PKW, Banyak penyelenggara program yang belum menjelaskan secara rinci dan detail bentuk kerjasama dengan UMKM, mitra

permodalan, mitra pemasaran (platform digital) dalam MOU terkait dengan program PKW

### Langkah Strategi

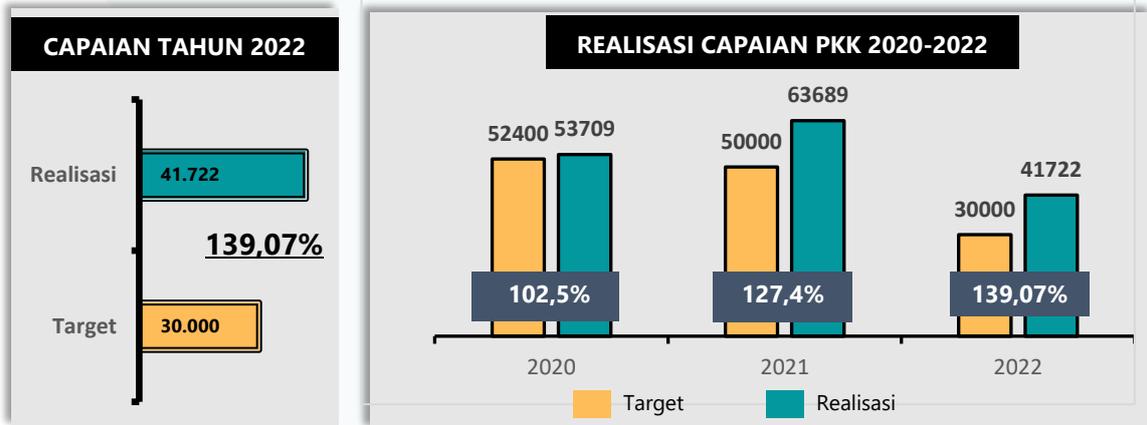
1. Melakukan coaching dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK pada aplikasi banper baik laporan teknis maupun administrasi keuangan serta melakukan bimbingan teknis implementasi penyelenggaraan Program PKK
2. Jadwal pembelajaran dipadatkan hingga merintis usaha sendiri
3. Lembaga penyelenggara diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi dan lembaga masih dapat mengupdate tracer study di aplikasi meskipun sudah mengunci laporan akhir
4. Meningkatkan peran organisasi mitra dalam pendampingan Lembaga Penyelenggara dalam pembuatan dan legalitas MOU secara rinci dan detail terkait program PKW

# 1

## Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)



Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja.



Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah memberikan bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja kepada 41.722 orang atau sebesar 139.07% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 30.000 orang.

Adapun penyebab lebihnya capaian dari target yang ditetapkan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian kategori Lembaga penyelenggara Program PKK.



Pada pelaksanaannya, sasaran peserta didik untuk kategori lembaga tipe platinum tidak terpenuhi, sehingga sisa dana dan sasaran dialihkan ke kategori lembaga tipe silver. Besaran dana perorang untuk tipe silver lebih kecil dari tipe platinum oleh karena itu mengakibatkan sasaran kategori silver menjadi bertambah.

- b. Besaran dana perorang yang diberikan kepada Lembaga tidak sama, besarnya disesuaikan dengan jenis keterampilan dan proposal yang diajukan

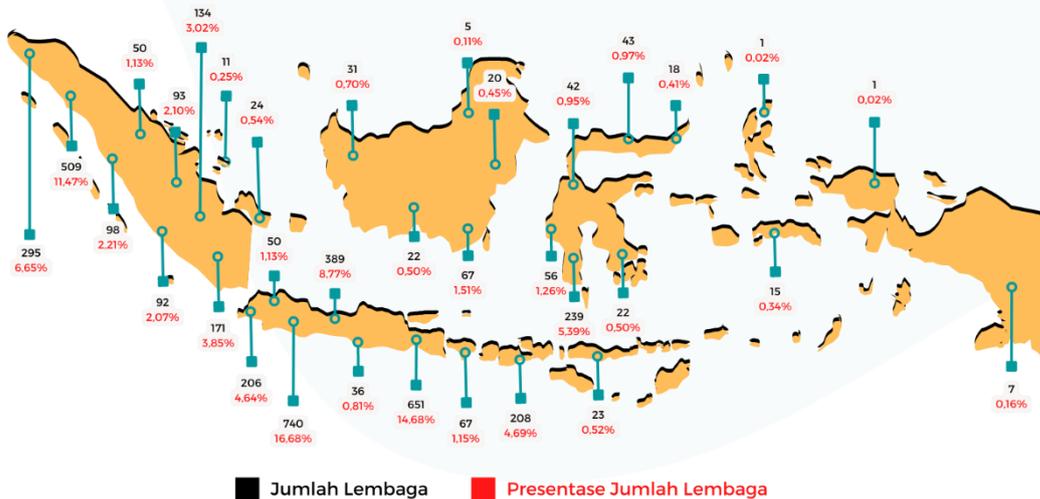
Capaian pada program PKK ini didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti:



### Lembaga Penyelenggara Program PKK

Gambar dibawah ini menunjukkan peta sebaran jumlah Lembaga Penyelenggara Program PKK di masing-masing provinsi.

### Peta Sebaran Lembaga Penyelenggara Program PKK 2022 Berdasarkan Provinsi

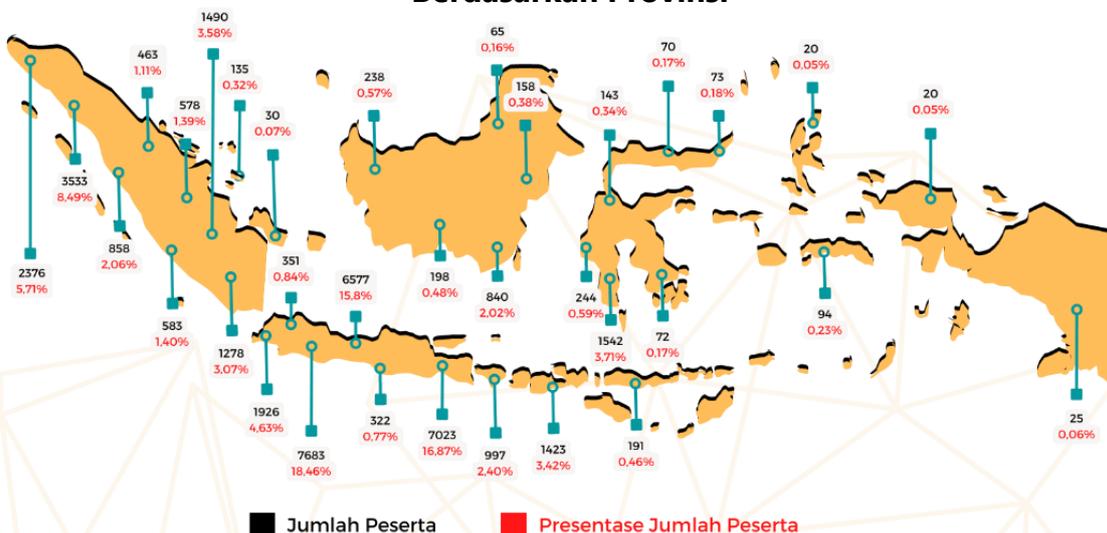


Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase Lembaga Penyelenggara terbanyak pertama berasal yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 16,68%, kedua Provinsi Jawa Timur sebanyak 14,68%, ketiga Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,47%, keempat Provinsi Jawa Tengah 8,77%, dan kelima Provinsi Aceh 6,65%.

### Peserta Didik Program PKK

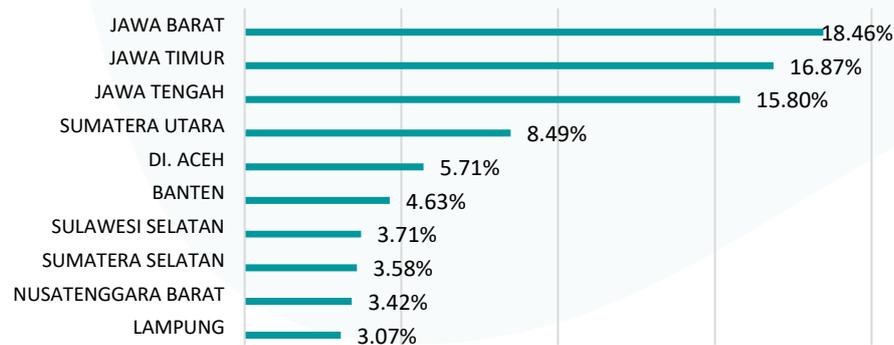
Gambar dibawah ini menunjukkan peta sebaran jumlah Peserta Didik Program PKK di masing-masing provinsi.

### Peta Sebaran Peserta Didik Program PKK 2022 Berdasarkan Provinsi



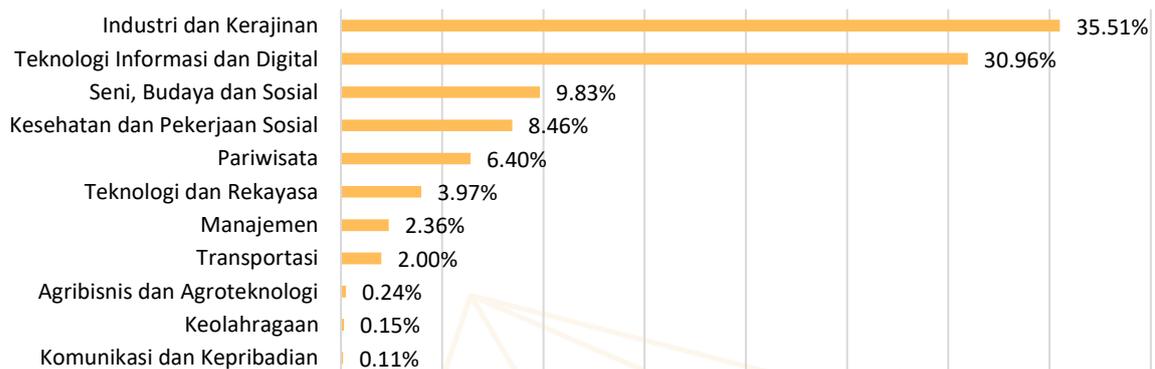
Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase peserta didik terbanyak pertama yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 18,46%, kedua Provinsi Jawa Timur sebanyak 16,87%, ketiga Provinsi Jawa Tengah 15,80%, selanjutnya diikuti

#### Peserta Didik Tertinggi Berdasarkan Provinsi



Provinsi Sumatera Utara, DI. Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Data ini mencerminkan bahwa peserta didik yang mendapatkan bantuan program PKK masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

#### Sebaran Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Rumpun Keterampilan



Dari total 11 rumpun keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga. Berdasarkan gambar di atas, terlihat rumpun keterampilan industri dan kerajinan merupakan rumpun yang paling banyak diminati dengan peserta didik mencapai 35,51% atau 14.777 orang. Jenis-jenis keterampilan pada rumpun industri dan kerajinan ini diantaranya bordir, membatik: pembuatan batik tulis, mebel, dan lain-lain.

sulam, tata boga jasa usaha makanan, tata boga pastri dan bakeri, dan tata busana.

Di posisi kedua rumpun keterampilan yang diminati adalah teknologi informasi dan digital dengan peserta didik sebesar 30,96% atau sejumlah 12.886 orang. Rumpun keterampilan teknologi informasi dan digital mencakup jaringan komputer dan sistem administrasi, komputer aplikasi perkantoran, multimedia, teknik komputer, *video editing*, *web programing* dan *Computer Aided Design* (CAD).





## HAMBATAN DAN KENDALA

Terjadi keterlambatan pencairan di bulan maret karena adanya perubahan sistem pencairan di aplikasi SAKTI

Adanya penambahan sasaran dan anggaran yang bersumber dari dana BA-BUN sehingga harus merevisi kembali target per bulan dan rencana perealisasiannya

Masih lemahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran di beberapa lembaga penyelenggara program PKK, peserta didik yang sudah direkrut mengundurkan diri

Bimbingan teknis yang dilakukan secara daring mengalami kendala yaitu materi yang diberikan tidak dapat diterima dengan baik oleh Lembaga Penyelenggara Program PKK

Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program PKK tepat waktu

Terdapat lulusan PKK yang sudah menyelesaikan pembelajaran hingga ujian kompetensi namun belum terserap di dunia kerja secara optimal karena terbatasnya lowongan pekerjaan di beberapa bidang keterampilan bagi para pekerja pemula (*entry level*) yang menjadi sasaran program PKK sebagai dampak pandemi covid 19



## STRATEGI/INOVASI

Berkoordinasi secara intensif dengan KPPN terkait kendala di aplikasi SAKTI

Melakukan revisi rencana penarikan dana dan melakukan percepatan verifikasi penetapan proposal agar tercapai sasaran PKK sebesar 30.000 peserta didik

Bagi lembaga yang peserta didiknya mengundurkan diri diperkenankan untuk mengganti peserta didik baru

Direktorat memfasilitasi ruang diskusi bagi lembaga penyelenggara Program PKK melalui grup *whatsapp* dan fitur chatting melalui aplikasi

Melakukan *coaching* dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK pada aplikasi banper baik laporan teknis maupun administrasi keuangan serta melakukan bimbingan teknis implementasi penyelenggaraan Program PKK

Lembaga penyelenggara diberikan kelonggaran untuk penempatan peserta didik ke dunia kerja dalam kurun waktu satu tahun setelah selesai uji kompetensi dan lembaga masih dapat mengupdate *tracer study* di aplikasi meskipun sudah mengunci laporan akhir

## 2

## Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)



Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal berwirausaha dengan sasaran Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) dengan rentang usia 15 s.d. 25 tahun.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penyebab anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka putus sekolah karena kurangnya biaya, sedangkan untuk menempuh pendidikan diperlukan biaya yang tidak sedikit khususnya pada pendidikan formal. Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan anak putus sekolah tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek hadir untuk menyediakan alternatif layanan pendidikan yaitu melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Bentuk layanan yang disediakan oleh Kemendikbudristek adalah dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).



Sebelum lembaga mendapat bantuan tersebut, lembaga perlu melalui beberapa tahapan proses seleksi, adapun tahapannya sebagai berikut:



Tujuan program PKW adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha bagi ATS melalui kursus dan pelatihan untuk menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha dan menciptakan ATS yang mampu merintis usaha mandiri dengan dibimbing oleh mitra usaha.

Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan telah memberikan bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha kepada 22.063 orang atau sebesar 110,89% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 19.896 orang.



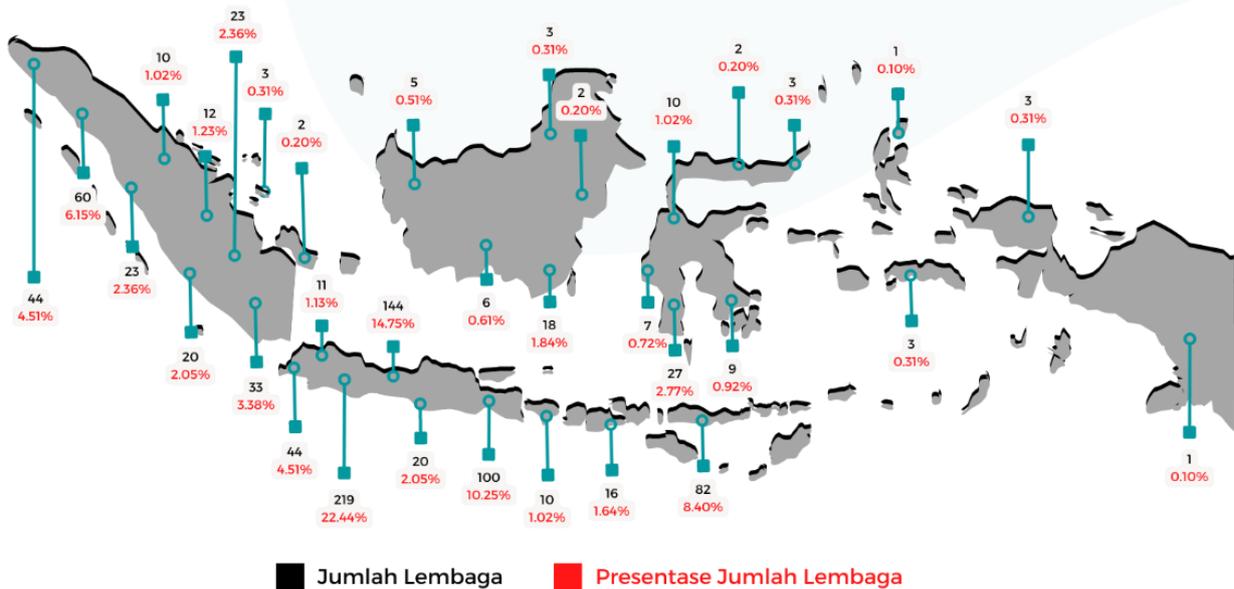
Capaian pada program PKW didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1** Pemberian bantuan PKW
- 2** Penyusunan dan pengadaan pedoman/kurikulum, bahan ajar
- 3** Sosialisasi/koordinasi penyelenggaraan program PKW
- 4** Penilaian dan penetapan proposal penyelenggara program PKW
- 5** Bimbingan teknis penyelenggaraan program PKW
- 6** Monitoring, evaluasi, supervisi program bantuan PKW
- 7** Verifikasi dan pengolahan laporan
- 8** Manajemen dukungan pengelolaan program bantuan
- 9** Penyusunan, pengadaan dan sosialisasi best practice PKW

### Lembaga Penyelenggara Program PKW

Gambar dibawah ini menunjukkan peta sebaran jumlah Lembaga Penyelenggara Program PKW di masing-masing provinsi.

**Peta Sebaran Lembaga Penyelenggara Program PKW 2022 Berdasarkan Provinsi**

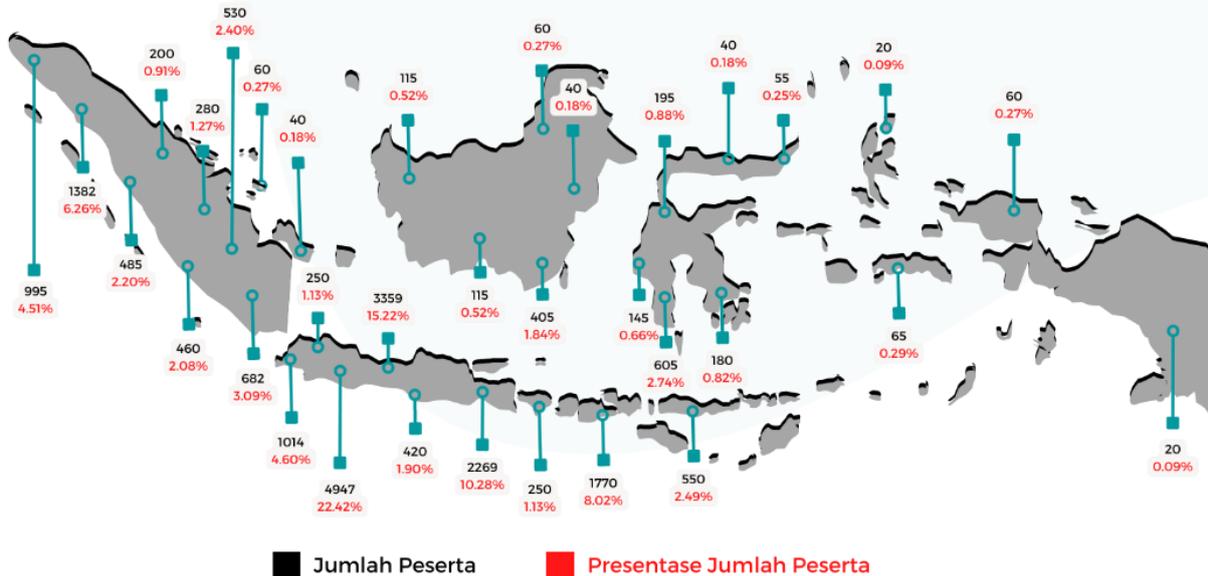


Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase Lembaga Penyelenggara terbanyak pertama berasal yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 22,44%, kedua Provinsi Jawa Tengah sebanyak 14,75%, ketiga Provinsi Jawa Timur sebesar 10,25%, keempat Provinsi Nusa Tenggara Barat 8,40%, dan kelima Provinsi Sumatera Utara 6,15%.

### Peserta Didik Program PKW

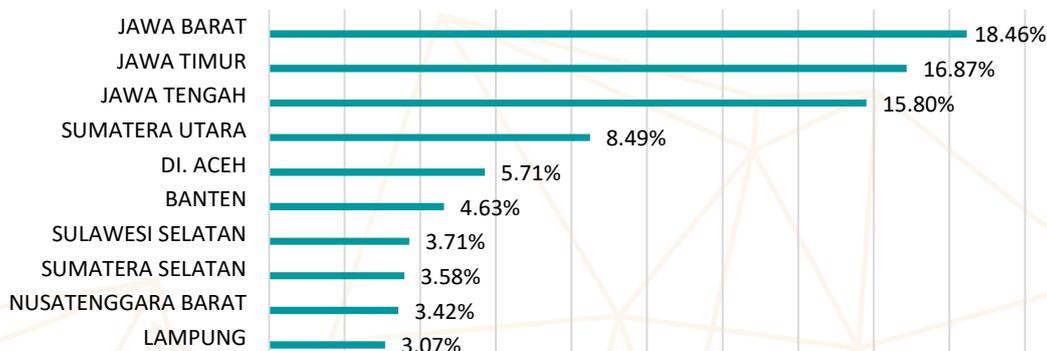
Gambar dibawah ini menunjukkan peta sebaran jumlah Peserta Didik Program PKW di masing-masing provinsi.

### Peta Sebaran Peserta Didik Program PKW 2022 Berdasarkan Provinsi

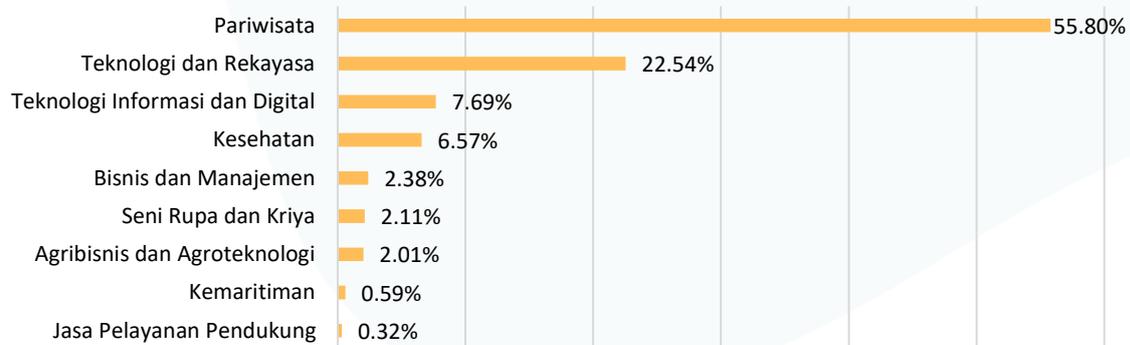


Berdasarkan gambar di atas, terlihat jumlah dan presentase peserta didik terbanyak pertama yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 22,42%, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15,22%, Provinsi Jawa Timur 10,28%, selanjutnya diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Banten, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Data ini mencerminkan bahwa peserta didik yang mendapatkan bantuan program PKW masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

### Peserta Didik Tertinggi Berdasarkan Provinsi



## Sebaran Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Rumpun Keterampilan



Dari total sembilan rumpun keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Berdasarkan gambar di atas, terlihat rumpun keterampilan pariwisata merupakan rumpun yang paling banyak diminati dengan peserta didik mencapai 55,80% yang meliputi beberapa jenis keterampilan seperti jasa usaha makanan, pastry & bakery, tata busana, tata rias pengantin, barista, tenun, dan batik.

Sementara di posisi kedua rumpun keterampilan yang diminati adalah teknologi informasi dan digital dengan peserta didik sebesar 22,54% dengan jenis keterampilan seperti



multimedia tingkat pemula, desain web, web programming, jaringan komputer & sistem administrasi, teknik komputer dan video editing.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Banyak penyelenggara program yang belum menjelaskan secara rinci dan detail bentuk kerjasama dengan UMKM, mitra permodalan, mitra pemasaran (platform digital) dalam MOU terkait dengan program PKW

Dalam kerjasama dengan Dekranas terdapat dua provinsi yang kabupaten/kota nya menggundurkan diri

Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu

Bimbingan teknis penyelenggaraan PKW dilakukan secara blended (luring dan daring). Hal tersebut menyebabkan pemahaman mengenai materi bimbingan teknis yang disampaikan para narasumber kurang dapat diterima secara optimal oleh beberapa peserta kegiatan yakni lembaga calon penyelenggara program PKW, terutama yang dilakukan secara daring

Terjadi keterlambatan penetapan tahap akhir hingga bulan oktober karena menunggu daerah afirmasi



## STRATEGI/INOVASI

Meningkatkan peran organisasi mitra dalam pendampingan Lembaga Penyelenggara dalam pembuatan dan legalitas MOU secara rinci dan detail terkait program PKW

Meminta kepada pihak Dekranas untuk mengganti dengan provinsi atau kab kota yang siap melaksanakan program PKW

Dilakukan coaching dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK dan PKW baik dari laporan teknis pelaksanaan maupun administrasi keuangan

Dengan memfasilitasi ruang diskusi bagi Lembaga melalui group whatsapp

Meminta kepada pihak Dekranas untuk mengganti dengan provinsi atau kab kota yang siap melaksanakan program PKW

Jadwal pembelajaran dipadatkan hingga merintis usaha sendiri



## SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

**S**asaran Kegiatan meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lewat pendidikan kursus dan pelatihan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar DUDIKA dan juga tepat sasaran dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia kerja.

Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan dapat menjangkau 1.273 lembaga kursus dan pelatihan yang berpartisipasi dalam program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan yang bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan kursus dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan yakni jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

**IKK 2.1**

**Jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**

TARGET 2022	TARGET AKHIR RENSTRA
1.075 Lembaga	7.062 Lembaga
CAPAIAN 2022	% CAPAIAN
1.273 Lembaga	42,99%

Pada **Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja**. Lembaga Kursus dan Pelatihan dikatakan sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, apabila:

1. Menyusun dan menerapkan SKL dan kurikulum berbasis dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan
2. Menyusun dan menggunakan bahan ajar (luring dan daring) mengacu pada SKL dan kurikulum yang dikembangkan berbasis dunia kerja untuk mendukung pembelajaran daring
3. Memiliki unit usaha sebagai *teaching factory*
4. Menyelenggarakan rintisan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kerjasama dengan perguruan tinggi
5. Menyelenggarakan pusat pengembangan karier
6. Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja
7. Penguji dan Pengelola UJK kursus dan pelatihan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan uji kompetensi
8. Dinilai Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan
9. Bertransformasi menjadi Akademi Komunitas
10. Menyelenggarakan *Project Based Learning* (PjBL)

## Metode Penghitungan

$$K = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J$$

### Keterangan

- **K** : Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
- **A** : Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menyelenggarakan *Project Based Learning* (PJBL) yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk yang diselenggarakan oleh LKP
- **B** : Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring, yaitu sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung namun dilakukan secara online menggunakan internet yang diselenggarakan oleh LKP.
- **C** : Jumlah LKP yang memiliki unit usaha, yaitu unit usaha baik jasa maupun produk yang dikelola oleh LKP yang selain bisa mendapatkan *income* juga bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran berpusat produksi atau jasa yang menyelenggarakan pengajaran dan pelatihan (praktek) yang berdasar pada prosedur dan standar yang telah ditetapkan di dunia industri, serta disesuaikan dengan situasi sekarang ini (modern).
- **D** : Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga, yaitu sistem evaluasi terhadap kinerja LKP agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan yaitu 8+i, dimana LKP sudah menyusun kurikulum bersama dengan DUDIKA, menerapkan pembelajaran berbasis project riil, peran instruktur atau instruktur ekspert dari DUDI ditingkatkan secara signifikan, instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan training dari DUDIKA, Sertifikasi Kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan DUDIKA, magang/praktek

kerja industri, riset terapan sederhana bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDIKA dan masyarakat, komitmen serapan lulusan oleh DUDIKA, beasiswa atau ikatan dinas dari DUDIKA untuk peserta didik, dan Donasi dari DUDIKA dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya, bagi kursus dan pelatihan

- **E** : Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja, yaitu Instruktur dan pengelola LKP lembaga kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya di dunia kerja dalam menggunakan teknologi dan inovasi terbaru
- **F** : Jumlah penguji uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya, yaitu Master Penguji dan Penguji Uji Kompetensi jenis keterampilan baru yang ditingkatkan kompetensinya dan mendapat sertifikasi sebagai penguji
- **G** : Jumlah pengelola uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya
- **H** : Jumlah LKP yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan SMK atau perguruan Tinggi, yaitu proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya yang sudah di rekognisi baik di SMK maupun di perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dibuktikan dengan lulusan kursus dan pelatihan sudah mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Nomor Induk Siswa (NIS)
- **I** : Jumlah LKP yang mempunyai Pusat Pengembangan Karir, yaitu unit yang dibentuk di LKP yang menjadi mitra lembaga pemerintah sebagai unit pelaksana yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja,

penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja serta berfungsi meningkatkan pemahaman dunia usaha/industri terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia usaha/industri, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan.

- **J** : Jumlah LKP yang bertransformasi menjadi Akademi Komunitas (AK), yaitu jumlah minimal LKP yang mengajukan usulan pendirian Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) swasta melalui SILEMKERMA dan sudah mendapatkan akun.

LKP calon pengusul dikurasi berdasarkan kriteria tertentu melalui survei elektronik dari LKP:

- Alumni Program Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia LKP Berbasis Industri (PPKSDM LKP BI),
  - Sasaran Penilaian Kinerja LKP berbasis industri tahun 2022, pengakses bantuan pemerintah PKK ,PKW, dan *Teaching Factory*
  - LKP yang dianggap unggul dan memenuhi kriteria. Ditetapkan dengan pertimbangan: 1) Sebaran jenis keterampilan/prodi unggulan di Kabupaten/Kota , 2) Proporsi jumlah lulusan SMA/SMK dengan jumlah perguruan tinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan 3) Afirmasi daerah 3T. Pendirian PTV swasta dalam bentuk: akademi komunitas, politeknik atau akademi. LKP calon pengusul yang telah ditetapkan difasilitasi pemenuhan persyaratan atas pendirian PTV swasta.
- Satuan : Lembaga
  - Tipe Penghitungan : Nonkumulatif
  - Unit Kerja : Direktorat Kursus dan Pelatihan
  - Sumber Data : Direktorat Kursus dan Pelatihan (SIMANTAP), Dit. KLSD (SILEMKERMA), DAPODIK
  - Periode Pengumpulan Data : Tahunan

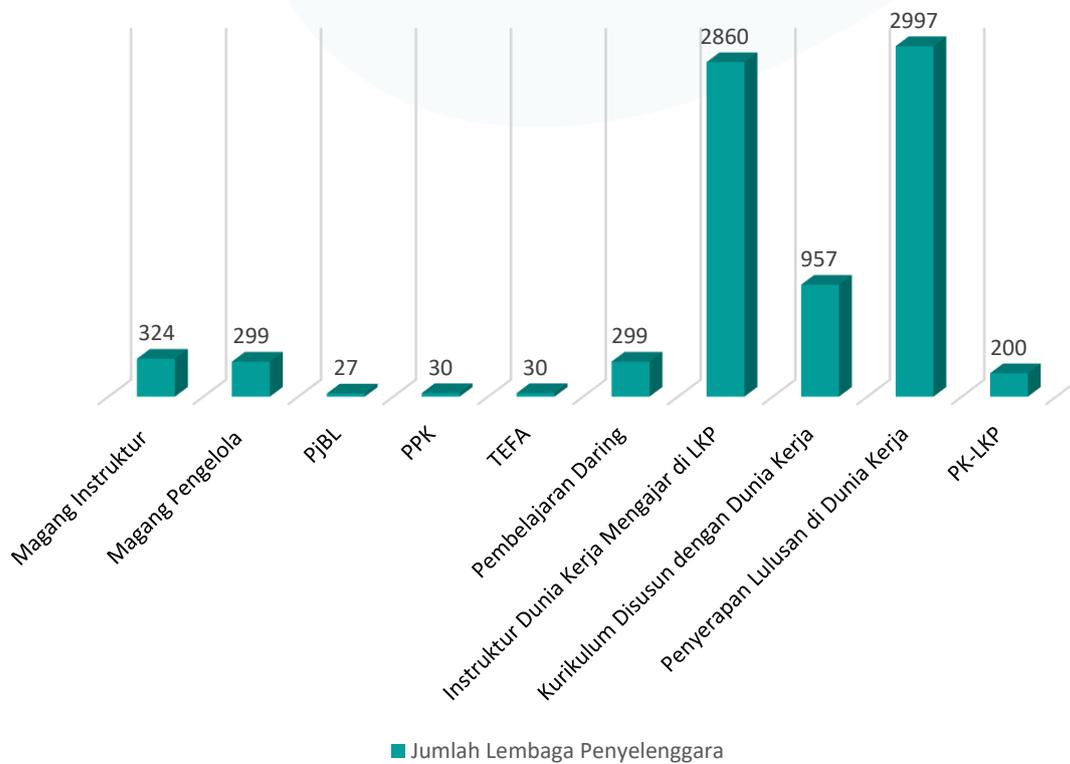
## Capaian

Capaian pada IKK ini di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan pada rencana strategis satuan kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan. Adapun di tahun 2022 capaian pada IKK ini sebesar 1.273 lembaga. Hasil ini melampaui target awal yaitu 1.075 lembaga dan presentase capaian pada IKK ini di tahun 2022 adalah 118,41%. Ketercapaian pada IKK ini melebihi target dikarenakan didukung oleh 10 program yaitu:

1. Penyelenggaraan *Project Based Learning* (PJBL)
2. Penyelenggaraan Pembelajaran Daring di LKP
3. Teaching Factory LKP
4. Penilaian Kinerja Lembaga
5. Permagangan Instruktur dan Pengelola LKP di Dunia Kerja
6. Peningkatan Kompetensi Penguji Pada Uji Kompetensi
7. Peningkatan Kompetensi Pengelola Uji Kompetensi
8. Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
9. Pusat Pengembangan Karir
10. LKP yang Bertransformasi menjadi Akademi Komunitas (AK)

Lewat 10 program pendukung di atas dihasilkan output berupa satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Satuan Pendidikan kursus dan pelatihan yang tersebar di wilayah Indonesia berhasil diintervensi oleh program-program Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun gambarannya dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

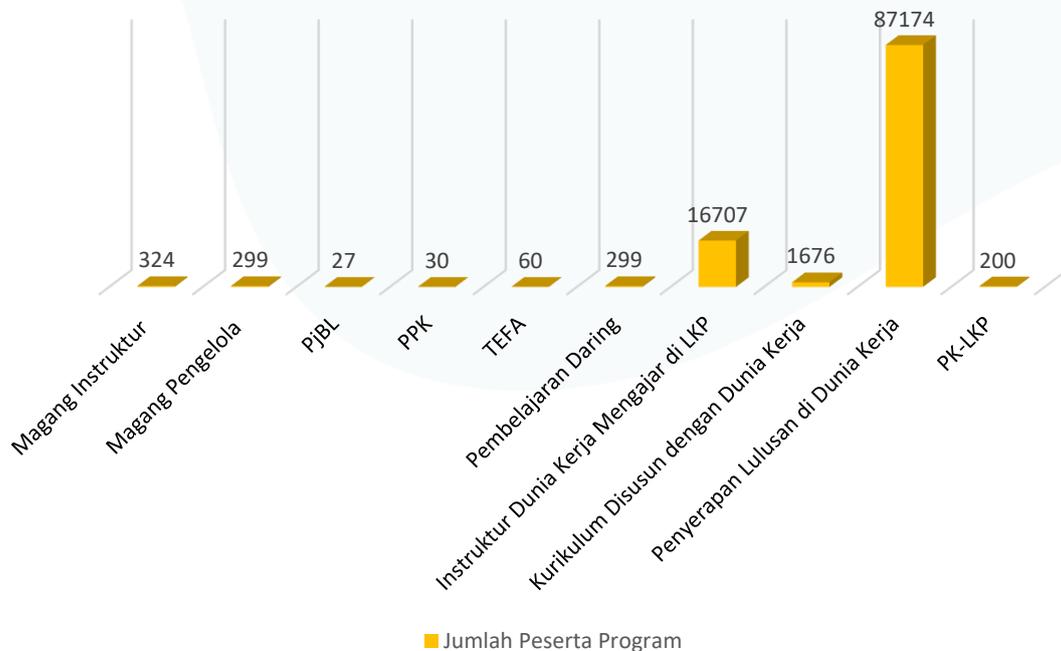
Sebaran Jumlah Lembaga Penyelenggara Program Ditsuslat



Jika melihat grafik di atas, capaian tertingginya adalah 2.997 lembaga di Indonesia yang berhasil menerapkan pembelajaran berbasis industri sehingga dapat menghasilkan lulusan yang dapat terserap di dunia kerja.

Sementara untuk melihat jumlah sebaran dari jumlah peserta program-program di sasaran kegiatan ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

### Sebaran Jumlah Peserta Program Ditsuslat



Adapun sebaran lembaga yang berhasil diintervensi melalui program yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan jika dilihat berdasarkan provinsi di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**DAFTAR TOTAL LEMBAGA DAN PESERTA YANG DIINTERVENSI MELALUI PROGRAM DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN BERDASARKAN PROVINSI**

Provinsi	Total Lembaga	PK-LKP	Penyerapan Lulusan di Dunia Kerja	Kurikulum Disusun Bersama dengan Dunia Kerja	Pembelajaran Daring	PPK	PJBL	Magang Instruktur	Instruktur Dunia Kerja Mengajar di LKP	Magang Pengelola	TEFA
Prov. Aceh	140	0	3301	87	4	0	0	4	589	4	0
Prov. Bali	56	0	1760	19	12	3	2	12	476	12	2
Prov. Bangka Belitung	5	0	84	4	0	0	0	0	23	0	0
Prov. Banten	97	0	2648	69	3	0	0	5	480	3	2
Prov. Bengkulu	41	0	1139	28	1	0	0	2	237	1	2
Prov. D.I. Yogyakarta	60	14	1646	54	16	1	3	17	304	16	6
Prov. D.K.I. Jakarta	59	9	1178	29	8	0	0	8	214	8	0
Prov. Gorontalo	19	0	245	1	2	0	0	2	44	2	0
Prov. Jambi	45	0	1271	19	1	0	0	2	197	1	0
Prov. Jawa Barat	488	81	13916	259	49	4	4	52	2546	49	4
Prov. Jawa Tengah	396	20	16464	216	51	5	5	55	2312	51	14
Prov. Jawa Timur	542	37	14037	151	46	6	4	53	3193	46	8
Prov. Kalimantan Barat	27	0	505	8	4	1	0	4	117	4	0
Prov. Kalimantan Selatan	89	0	2056	87	5	0	0	5	341	5	0
Prov. Kalimantan Tengah	19	0	505	14	9	2	2	9	123	9	2
Prov. Kalimantan Timur	49	0	798	13	10	0	2	10	160	10	4
Prov. Kalimantan Utara	3	0	104	4	1	0	0	1	18	1	0
Prov. Kepulauan Riau	10	0	251	4	3	0	0	3	42	3	0
Prov. Lampung	129	0	2807	86	11	2	1	13	632	11	2
Prov. Maluku	8	0	61	2	1	1	0	1	25	1	0
Prov. Maluku Utara	3	0	4	1	0	0	0	0	9	0	0
Prov. Nusa Tenggara Barat	137	0	3109	118	10	3	2	11	648	10	6
Prov. Nusa Tenggara Timur	28	0	1093	39	2	0	0	2	252	2	0
Prov. Papua	6	0	87	5	1	0	0	1	15	1	0
Prov. Riau	56	0	1308	27	2	2	0	2	316	2	0
Prov. Sulawesi Barat	25	0	381	10	2	0	0	2	63	2	2
Prov. Sulawesi Selatan	178	11	3705	75	16	0	0	18	615	16	2
Prov. Sulawesi Tengah	37	0	610	22	3	0	0	3	96	3	0
Prov. Sulawesi Tenggara	33	0	470	11	1	0	0	1	109	1	0
Prov. Sulawesi Utara	17	0	260	9	2	0	0	2	58	2	0
Prov. Sumatera Barat	57	0	1611	33	6	0	1	6	466	6	2
Prov. Sumatera Selatan	87	0	2524	47	6	0	0	6	744	6	0
Prov. Sumatera Utara	455	28	7236	125	11	0	1	12	1243	11	2

Dapat dilihat melalui tabel di atas bahwa jumlah lembaga yang diintervensi oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan total 542 lembaga. Di posisi kedua terdapat Provinsi Jawa Barat dengan total 488 lembaga yang berhasil diintervensi melalui program di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sementara di posisi ketiga ada Provinsi Sumatera Utara dengan total 455 lembaga. Adapun hambatan/kendala serta langkah strategi dalam pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut:

### Hambatan/Kendala

Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti DUDIKA, Perguruan Tinggi, dan K/L terkait dalam program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) sehingga pelaksanaan program menjadi kurang fokus, integratif, efisien dan efektif

### Langkah Strategi

Meningkatkan koordinasi dengan DUDIKA, Perguruan Tinggi dan K/L terkait dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, workshop dan seminar serta pemberian penghargaan baik secara luring, daring maupun hybrid tentang program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) serta peran dan bentuk kerjasama apa saja yang bisa dilaksanakan bersama agar program kursus dan pelatihan menjadi lebih fokus, integratif, efisien dan efektif.

1

## Jumlah SKL, KBK dan Bahan Ajar yang Disusun Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja



### CAPAIAN 2022



**10**  
Dokumen

Penyusunan SKL dan Kurikulum dilakukan dalam memenuhi standar materi pembelajaran, pedoman pembelajaran dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik didik pada lembaga kursus dan pelatihan atau bagi yang belajar mandiri.

Penyusunan SKL dan Kurikulum ini dilakukan untuk 10 jenis bidang keterampilan, yang terbagi dalam 8 bidang keterampilan kaji ulang SKL dan Kurikulum dan 2 bidang keterampilan baru yang belum pernah disusun SKL dan Kurikulum Kursus dan Pelatihan.



Bidang tersebut antara lain:

### Bidang Keterampilan Lama



### Bidang Keterampilan Baru



Kegiatan penyusunan SKL dan Kurikulum ini dilakukan dalam tahapan berikut:



### TAHAP I : Penetapan Bidang Keterampilan SKL dan Kurikulum

- a. Identifikasi Bidang Keterampilan, dengan pertimbangan sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kajian banding (*bench mark*), ilmu atau teknologi baru, dan perjenjangan serta deskripsi KKNi.
- b. Identifikasi Tim Penyusun yang merupakan unsur dari:



## TAHAP II : Penyusunan dokumen SKL dan Kurikulum

### 1) Penyusunan Draft SKL dan Kurikulum

Tim yang sudah ditetapkan menyusun draft SKL sesuai dengan sistematika dan format penyusunan SKL

### 2) Penelaahan (Reviu) Draft SKL

Draft SKL ditelaah oleh tim pembahas yang terdiri atas penyusun dan penelaah. Penelaah SKL dari dunia kerja dan penelaah kurikulum dari instruktur LKP atau akademisi bidang keterampilan terkait

### 3) Uji Publik Draft SKL dan Kurikulum

Uji publik bertujuan untuk menguji keterbacaan dan tingkat pemahaman pihak terkait terhadap SKL yang disusun. Uji publik dilakukan secara luring dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria.

- **Uji publik daring** dilakukan melalui penyebaran instrumen uji publik di berbagai platform media sosial.
- **Uji publik luring** dilakukan di 6 kota (Kabupaten Lebak, Kota Samarinda, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Palu) dengan pertimbangan banyaknya jumlah LKP yang menyelenggarakan bidang terkait.

### 4) Validasi Kurikulum

Validasi kurikulum dilakukan untuk menindaklanjuti masukan dari para responden (instruktur, DUDIKA, pengelola LKP) uji publik SKL dan Kurikulum

### 5) Finalisasi Draft SKL dan Kurikulum

## TAHAP III : Tindak Lanjut

✓

1. Penetapan SKL Kurikulum

✓

2. Sosialisasi dan Penerapan SKL dan Kurikulum

Kegiatan tersebut dilakukan selama tiga hari dan *output* setiap kegiatan terdapat progress penyusunan SKL dan kurikulum, mulai dari profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur kompetensi lulusan, matriks kurikulum, daftar modul, dan penilaian capaian pembelajaran.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Minimnya jumlah penyusun bidang keterampilan karena terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga waktu yang diperlukan untuk proses penyusunan cenderung lebih lama

Validasi SKL tidak dapat dilaksanakan karena ada pemblokiran anggaran sehingga hanya bisa dilakukan validasi kurikulum

Hambatan pada uji publik:

- a. Tidak semua lembaga kursus mengetahui kegiatan uji publik SKL dan Kurikulum, walaupun sudah disosialisasikan melalui berbagai media sosial (whatsapp group, instagram, facebook dan twitter) yang dimiliki dengan menyasar organisasi mitra untuk membantu menyiarkan ke lembaga kursus dan pelatihan
- b. Waktu yang pendek menjadikan tidak semua lembaga kursus menyimak secara utuh terhadap dokumen

Finalisasi SKL dan kurikulum yang belum maksimal saat kegiatan, beberapa bidang masih belum menyelesaikan substansi sesuai dengan pedoman penyusunan



## STRATEGI/INOVASI

Karena terbatasnya jumlah penyusun, masing-masing bidang melakukan diskusi daring dengan organisasi profesi terkait untuk memantapkan dan memperoleh kesepakatan terhadap substansi SKL & Kurikulum

Validator melakukan validasi dua dokumen SKL dan Kurikulum sekaligus dalam satu kegiatan

Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan sosialisasi program lainnya seperti PKK dan PKW

Finalisasi SKL dan Kurikulum dilakukan pembahasan akhir yang lebih intens per bidang keterampilan melalui zoom dengan penjadwalan 1 minggu 2 bidang keterampilan, yang dilakukan pada bulan September s.d November 2022

## 2

### Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja (*Project Based Learning/PjBL*)



#### CAPAIAN 2022



# 25

Lembaga

Pembelajaran berbasis proyek merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan manajemen produksi dengan aktivitas pembelajaran. Peserta didik belajar dari mulai menganalisis spesifikasi proyek (produk/jasa) yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, hingga pelayanan purna jual, dan evaluasi proses produksi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) yang sudah dilakukan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



### 1 - Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran PjBL

#### Tujuan



- Menyusun draft pedoman pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja melalui Pendekatan *Project Based Learning* (PjBL) bagi LKP



- Menyusun rencana persiapan dan mekanisme pelaksanaan program pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja melalui Pendekatan *Project Based Learning* (PjBL)

## Output



- Konsep dan Mekanisme Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja di LKP Berbasis Industri



- Strategi pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja pada Program Kursus Dan Pelatihan



- Metode/model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia Kerja di LKP Berbasis Industri



- Adanya contoh – contoh konkret implementasi pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia Kerja



- Draft Pedoman Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja

## Dokumentasi Kegiatan



## 2 - Penyusunan Perangkat pembelajaran melalui Pendekatan PjBL

### Tujuan



- Menyusun perangkat pembelajaran sesuai strategi pembelajaran PjBL yang merupakan bagian dari pedoman pembelajaran PjBL bagi LKP

### Output



- Konsep rencana pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) Berbasis Dunia Kerja pada program kursus dan pelatihan



- Konsep Kurikulum pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) Berbasis Dunia Kerja pada program kursus dan pelatihan



- Konsep evaluasi pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) Berbasis Dunia Kerja pada program kursus dan pelatihan



- Format umpan balik pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja untuk peserta didik dan pendidik



- Draft final Pedoman Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja.

### Dokumentasi Kegiatan



### 3 - Kurasi LKP dan Dunia Kerja Pelaksana Pembelajaran PjBL

#### Tujuan



- Terseleksinya LKP dan dunia kerja yang memenuhi persyaratan serta kriteria tertentu untuk menyelenggarakan program pembelajaran PjBL

#### Output



- Menghasilkan data LKP yang melaksanakan pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) berbasis dunia kerja

#### Dokumentasi Kegiatan



#### 4 - Orientasi Teknis Pelaksanaan Pembelajaran PjBL

##### Tujuan



- Tersosialisasinya program pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) kepada LKP dan dunia kerja yang memenuhi persyaratan serta kriteria tertentu untuk menyelenggarakan program pembelajaran PjBL

##### Output



- LKP bisa menemukan solusi-solusi kreatif untuk menyelesaikan proyek



- LKP menjadi lebih aktif dalam berdiskusi, menyelidiki, dan bertukar pendapat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang bersifat nyata



- LKP mempunyai pengalaman untuk mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan proyek

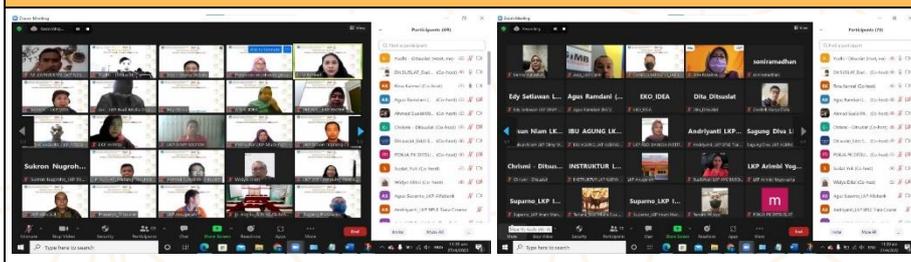


- Meningkatnya kemampuan berpikir untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan proyek



- Tumbuhnya iklim toleran untuk mengakomodir terjadinya kekurangan gagasan/ide atau terjadinya kesalahan/perubahan selama aktivitas pembelajaran

#### Dokumentasi Kegiatan



## 5 - Pendampingan pembelajaran PjBL

### Tujuan



- Memetakan potensi dan kinerja 27 (dua puluh tujuh) LKP piloting dalam menerapkan pedoman PjBL



- Menggali permasalahan yang ditemui 27 (dua puluh tujuh) LKP dalam menerapkan pedoman PjBL



- Memberikan advokasi secara konseptual dan teknis penerapan PjBL kepada pengelola dan instruktur di 27 (dua puluh tujuh) LKP

### Hasil Analisa Pendampingan PjBL

- **Penentuan order untuk tema belajar**

Secara umum dapat ditemukan bahwa sekitar 69,44% (cukup efektif) responden di 27 LKP menyatakan bahwa order berupa produk (barang/jasa) diperoleh oleh peserta didik hasil kerja sama dengan industri/pemberi order.c

- **Kriteria dan kompetensi peserta didik**

Secara umum, sekitar 76,04% (cukup efektif) peserta didik yang dilibatkan dalam PjBL di LKP mempunyai kemampuan untuk menjelaskan standar dan proses pembuatan suatu order yang akan di-PjBL-kan, mampu menceritakan dan memberikan contoh terkait penggunaan bahan dan alat yang akan dipergunakan untuk membuat produk pada aktivitas PjBL, serta mampu mensimulasikan atau mempraktikkan kemampuannya untuk mengerjakan order

- **Kriteria dan kompetensi instruktur**

Secara umum sekitar 73,21% (cukup efektif) instruktur mempunyai kemampuan menjelaskan langkah-langkah penerapan PjBL dalam aktivitas pembelajaran di LKP, dimulai dari tahap pendahuluan, persiapan, membuat produk, menyimpulkan proses pembuatan produk, membuat laporan dan memaparkan proses dan hasil proyek, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, para instruktur di LKP juga mempunyai kemampuan untuk menjelaskan teknis dan prosedur mengaitkan/menghubungkan order untuk PjBL dengan kompetensi inti/kompetensi dasar/tema pembelajaran yang terdapat pada kurikulum yang ditandai dengan terdapatnya dokumen desain PjBL di LKP, baik dalam bentuk hard file atau soft file, dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PjBL di LKP, dokumen modul/diktat/bahan ajar dan/atau media belajar (poster/leaflet/video/photo) di LKP.

- **Penerapan prinsip pembelajaran berbasis proyek**

Secara umum sekitar 76,79% (cukup efektif) dari seluruh responden pada 27 LKP menyatakan bahwa peserta didik bersama instruktur yang di fasilitasi pengelola sudah terbiasa untuk melakukan promosi/penerimaan order untuk dijadihkan sebagai bahan merancang proyek dengan melibatkan peserta didik.

- **Aktivitas pendahuluan dan persiapan**

Secara umum sekitar 72,22% (cukup efektif) pada tahap pendahuluan dan persiapan responden menyatakan bahwa industri pemberi order terlebih dahulu menginformasikan terkait spesifikasi order dan aspek-aspek yang terdapat pada suatu produk yang akan diproyekkan pada saat melaksanakan PjBL. Selain itu di LKP juga sudah terdapat

video/photo/media belajar sebagai ilustrasi dari produk yang akan dikerjakan, serta sudah terdapat jadwal pengerjaan suatu proyek

- **Penerapan aktivitas pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek**



Secara umum masuk pada kategori cukup efektif yaitu sekitar 64,58% yang divisualkan dengan keberadaan dokumentasi berupa photo/ video yang

memvisualkan aktivitas peserta didik ketika menyiapkan alat dan bahan terkait proyek, aktivitas peserta didik ketika mempraktikkan pembuatan produk, dan terdapat contoh dokumen laporan pembelajaran, serta lembar review terhadap pelaksanaan proyek

- **Penilaian pembelajaran berbasis proyek**

Penerapan aktivitas penilaian pembelajaran berbasis proyek, secara umum masuk pada kategori tidak efektif yaitu sekitar 50,58%. bahwa untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik hanya beberapa yang menggunakan penilaian pembelajaran berbasis proyek

- **Produk**

Produk yang dihasilkan oleh peserta didik melalui aktivitas pembelajaran berbasis proyek, secara umum masuk pada kategori cukup efektif yaitu sekitar 73,61%.

- **Outcome**

Pada dimensi dampak yang ditimbulkan dari penerapan aktivitas pembelajaran berbasis proyek di 27 (dua puluh tujuh) LKP, masuk pada kategori cukup efektif karena sekitar 83,33% peserta didik yang menjadi responden dalam kegiatan pendampingan bisa diklasifikasikan

memperoleh manfaat dari penerapan PjBL yang dilaksanakan di LKP. Dengan kata lain, penerapan PjBL tersebut menjadi katalisator terbentuknya kompetensi dan kesiapan mental peserta didik untuk mengimplementasikan hasil belajarnya di LKP pada dunia kerja atau ketika memilik untuk menjadi pelaku bisnis/starup di masyarakat.

### Dokumentasi Kegiatan



## 6 - Monitoring dan Evaluasi PjBL

Dilakukan monitoring dan evaluasi bagi lembaga pelaksana program



## HAMBATAN DAN KENDALA

Belum menemukan pola PjBL yang tepat dalam penerapan di ranah keterampilan praktis

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan PjBL belum tertata dengan baik

Prosedur penerapan PjBL di LKP yang menjadi *piloting project* berbeda-beda dan sesuai dengan kompetensi instruktur



## STRATEGI/INOVASI

Dilakukan pendampingan pasca pelaksanaan PjBL untuk memetakan hasil dan menggali permasalahan untuk menemukan pola pelaksanaan PjBL yang ideal

Memberikan pengarahan teknis dokumentasi kegiatan PjBL kepada Lembaga yang menjadi *piloting project*

Menyusun petunjuk teknis terkait dengan penerapan PjBL di tingkat satuan pendidikan kursus dan pelatihan

3

## Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring



CAPAIAN 2022

25  
Video

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diselenggarakan secara jarak jauh, melalui jaringan internet, yang dapat memfasilitasi peserta didik lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Era disrupsi dan pandemi covid-19 telah memunculkan layanan kursus daring yang dapat diakses melalui laman penyedia layanan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang tidak segera melakukan inovasi baik dalam layanan program maupun pola pembelajarannya. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan jumlah peserta didik di sebagian LKP. Inovasi pembelajaran pada LKP melalui pembelajaran daring sudah merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat, pemerintah berupaya untuk mendorong, mengarahkan dan memfasilitasi LKP. Prioritas dalam implementasi pembelajaran daring adalah bimbingan teknis dan produksi bahan ajar kursus daring.

Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2022 telah melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kursus dalam jaringan (daring). Adapun jumlah pesertanya adalah:

68 Lembaga (Luring)

915 Lembaga (Daring)

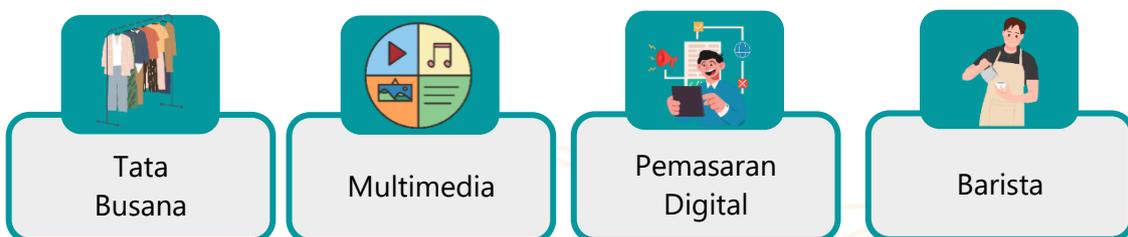
Dalam pembelajaran kursus daring memerlukan materi-materi dalam proses pembelajarannya. Penyampaian materi dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Peserta didik akan dengan mudah menyerap dan memahami materi apabila bahan ajar yang disajikan dikemas dalam bentuk yang interaktif dan menarik. Bentuk kemasan

bahan ajar yang dimaksud salah satunya dalam bentuk bahan ajar audio visual atau video pembelajaran.

Pengembangan konten video pembelajaran merupakan bagian yang paling penting apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran konvensional/tatap muka langsung. Oleh sebab itu, untuk memenuhi konten-konten video pembelajaran yang mendukung penyelenggaraan kursus daring pada program PKK perlu dilaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan ajar kursus daring.

Salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan kursus daring adalah bahan ajar yang dikemas dalam bentuk video. Berbeda dengan pembelajaran konvensional bahan ajar kursus daring disajikan per topik pembelajaran dengan maksud agar peserta didik memahami materi sedikit demi sedikit. Karena sifatnya yang daring bahan ajar juga harus memperhatikan durasi. Apabila durasi terlalu lama maka akan menyebabkan peserta didik mudah jenuh sehingga pembelajaran tidak efektif.

Berdasarkan pentingnya video bahan ajar dalam penyelenggaraan kursus daring ini Direktorat Kursus dan Pelatihan memfasilitasi penyusunan bahan ajar kursus daring. Target jumlah bahan ajar kursus daring yaitu sebanyak 25 judul. Jenis keterampilan yang akan disusun bahan ajarnya terdiri dari empat jenis yaitu:



Dalam pelaksanaan penyusunan dan produksi bahan ajar kursus daring, Direktorat Kursus dan Pelatihan bekerjasama dengan praktisi kursus dan pelatihan pada empat jenis keterampilan tersebut sebagai penyusun naskah. Selain itu Direktorat Kursus dan Pelatihan juga bekerjasama dengan Akademisi

dari Universitas Sebelas Maret sebagai narasumber dan Phicos yang membantu mengedit naskah, melakukan pengambilan gambar dan editing video bahan ajar.

Tahapan proses penyusunan bahan ajar kursus sesuai gambar berikut:



Daftar 25 judul bahan ajar kursus dalam jaringan (daring) yang disusun tahun 2022 secara detail tersaji dalam tabel berikut:





**Pemasaran Digital**

1. Mencari jenis produk atau jasa yang sejenis
2. Mencari dan Mengidentifikasi data digital
3. Menyajikan data digital
4. Membuat konten gambar.
5. Mempublikasi produk atau jasa di pasar niaga elektronik
6. Mempublikasi produk atau jasa di media sosial



**Barista**

1. Pengenalan kopi
  - a. Jenis
  - b. Roasting Profile
  - c. Fragrance & Aroma
  - d. Rasa (asam, pahit, kental) dan Jejak Rasa
2. Memelihara bahan dan peralatan pengolahan kopi
3. Meracik dan menyajikan Manual Brew metode Immersion
4. Meracik, menyajikan Kopi Espresso dan Milk Base Coffee
5. Meracik dan menyajikan Manual Brew metode Drip
6. Meracik dan menyajikan Manual Brew metode press



**HAMBATAN DAN KENDALA**

Kurang intensnya komunikasi antara tim penyusun naskah jenis keterampilan Pemasaran Digital dengan Tim Produksi dan Editing sehingga mengakibatkan hasil akhir video bahan ajar kursus daring jenis keterampilan Pemasaran Digital belum optimal



**STRATEGI/INOVASI**

Meningkatkan komunikasi dengan diskusi terpumpun secara periodik baik secara daring maupun luring antara tim produksi dan editing serta penyusun naskah scenario bahan ajar jenis keterampilan pemasaran digital

Direktorat Kursus dan Pelatihan serta tim produksi dan editing didampingi narasumber dari akademisi melakukan produksi dengan talent yang memiliki kompetensi bidang pemasarans digital yang disiapkan oleh tim produksi

4

## Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Unit Produksi Sebagai *Teaching Factory*


**CAPAIAN 2022**

**149**  
Lembaga

*Teaching Factory* (TEFA) atau disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 sebagai pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur

dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industry dan tidak berorientasi mencari keuntungan. TEFA di LKP di definisikan sebagai suatu konsep pembelajaran di LKP berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industry. Yang dalam pelaksanaannya dituntut keterlibata mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan dari LKP.

TEFA yang diselenggarakan oleh LKP nantinya akan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan standar industri yang dapat dijual dan akan menjadi bagian dari pemasukan/omzet.



Dengan TEFA akan memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk belajar memproduksi sesuai dengan standar dunia kerja dan dapat mempraktikkan pengelolaan sebuah unit produksi yang menggambarkan lingkungan kerja nyata di dunia kerja dan juga diharapkan mampu meningkatkan keselarasan kurikulum di LKP dengan kebutuhan dunia kerja sebagai acuan dalam melatih peserta didik untuk bekerja dengan professional sesuai dengan standar dunia kerja.

Kemendikbudristek melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2021 telah memberikan bantuan kepada 30 LKP diberbagai bidang keterampilan yang menjadi percontohan. Pada tahun 2022, ada sebanyak 366 lembaga yang memiliki TEFA sudah di seleksi dan hasilnya terpilih sebanyak 149 LKP untuk pengembangan TEFA.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Pengembangan TEFA secara manajemen dan stuktur organisasinya masih ada yang menyatu dengan lembaga (LKP)

Masih ada lokasi TEFA dengan lembaga jarak tempuhnya cukup jauh sehingga menyulitkan untuk pembinaan dan pengawasan

Sarana yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis keterampilannya agar dalam pengembangan TEFA dapat berjalan dengan baik



## STRATEGI/INOVASI

Organisasi dan manajemen pengembangan TEFA harus dibedakan dengan lembaga (LKP)

Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara daring dan berkelanjutan.

Bekerja sama dengan DUDIKA dalam pemenuhan kebutuhan sarana praktik agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

## 5

## Jumlah LKP yang Dinilai Kinerja Lembaga



### CAPAIAN 2022

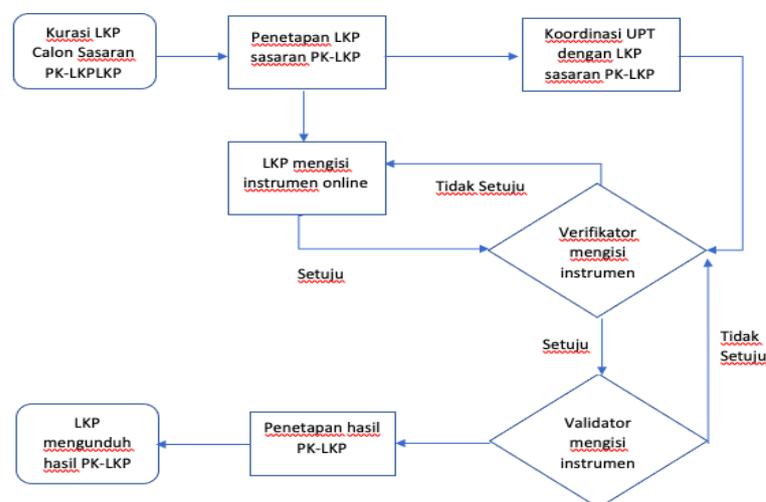


**200**  
Lembaga

Penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja diharapkan dapat memberikan informasi tentang efisiensi dan efektivitas ataupun tingkat ketercapaian program yang dirancang oleh LKP. Indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengukur seberapa baik LKP telah melakukan *quality improvement* (peningkatan kualitas) layanannya dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis dunia kerja. Dengan demikian dapat diperoleh pemetaan mutu LKP yang dapat digunakan dalam perencanaan pembinaan oleh pemerintah.

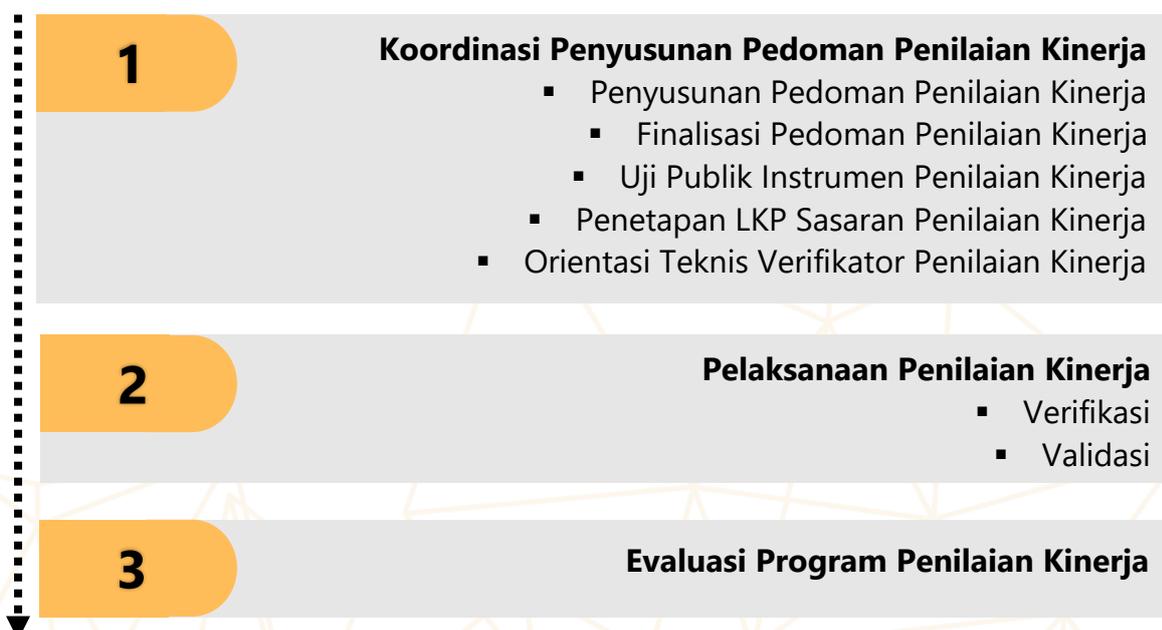
Bagi LKP sendiri, penilaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk evaluasi diri dalam rangka penjaminan mutu secara internal, sehingga menjadi acuan arah pengembangan program pelatihan yang diselenggarakan.

Aspek-aspek yang dinilai adalah kinerja pada aspek input, proses, output, dan outcome pada seluruh penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di LKP. Mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut:



1. Dipilih LKP yang sesuai kriteria pada pedoman untuk menjadi LKP sasaran penilaian kinerja.
2. LKP yang menjadi sasaran diberi waktu untuk mengisi instrument melalui system aplikasi.
3. Verifikator melakukan kunjungan ke LKP dan memverifikasi isian LKP pada aplikasi melalui pengamatan dan wawancara dengan pengelola dan/atau instruktur LKP. Verifikator mengisi instrument pada system aplikasi sesuai dengan hasil pengamatan dan konfirmasi dengan LKP.
4. Validator melakukan konfirmasi mengenai isian verifikator pada aplikasi kepada verifikator. Validator mengisi instrument pada system aplikasi sesuai dengan hasil konfirmasi dengan Verifikator.
5. Hasil penilaian kinerja ditetapkan dengan menerbitkan SK Direktur Kursus dan Pelatihan.
6. LKP mengunduh Salinan SK dan sertifikat hasil penilaian kinerja melalui system aplikasi.

Penyelenggaraan program penilaian kinerja berbasis dunia kerja tahun 2022 ini didukung oleh pelaksanaan serangkaian kegiatan berikut ini:



## 1. Koordinasi Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja



Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 23-25 Februari 2022. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan program penilaian kinerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan sebagai pelaksana (Direktorat Kursus dan Pelatihan, 7 UPT (B/BB PPMPV), akademisi, praktisi kursus, dan organisasi mitra. Hasil yang dicapai adalah konsep, pelaksanaan, pengelolaan, dan mekanisme program penilaian kinerja.

### a. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja



Kegiatan ini dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 8-10 Maret 2022. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan konsep, pelaksanaan, pengelolaan, dan mekanisme program penilaian kinerja yang sudah disusun pada kegiatan koordinasi sebelumnya, menjadi pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan program penilaian kinerja. Penyusunan pedoman ini melibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, 7 UPT (B/BB PPMPV), akademisi, praktisi kursus, dan organisasi mitra.

Hasil yang dicapai adalah tersusunnya draf instrumen dan pedoman penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja.

b. Finalisasi Pedoman Penilaian Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 17-19 Maret 2022. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meninjau Kembali draf pedoman penyelenggaraan penilaian kinerja yang sudah disusun pada kegiatan sebelumnya. Finalisasi pedoman ini melibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, 7 UPT (B/BB PPMPV), akademisi, praktisi kursus, dan organisasi mitra.

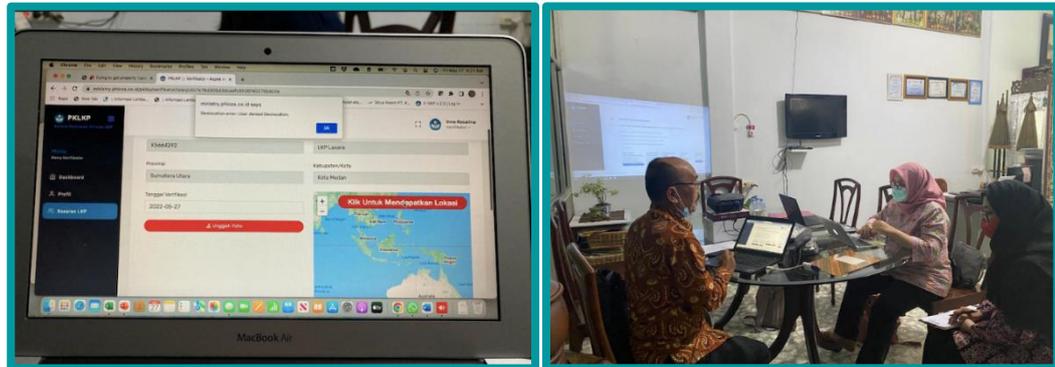
Hasil yang dicapai adalah tersusunnya instrumen dan pedoman penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja, dan kemudian dituangkan ke dalam sistem aplikasi penilaian kinerja berbasis dunia kerja.



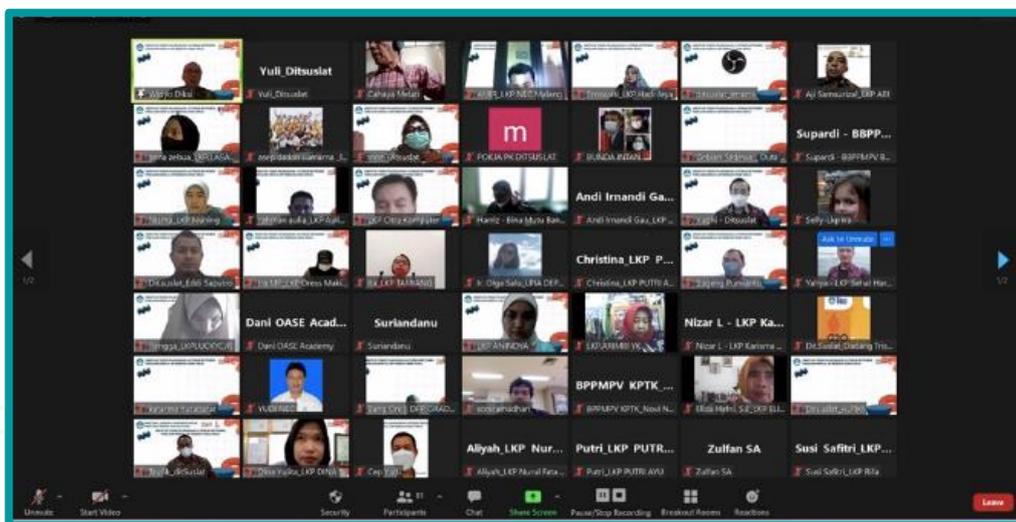
c. Uji Publik Instrumen Penilaian Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan pada rentang tanggal 23 s.d. 28 Mei 2022 dengan melakukan kunjungan ke 42 LKP untuk menguji keterbacaan dan pemahaman instrumen oleh LKP.

Uji public ini melibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dari hasil uji public ini diperoleh bahan perbaikan instrumen dan mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja.



Sebelum uji public dilaksanakan, seluruh LKP sasaran uji public diundang untuk mengikuti orientasi teknis uji public instrument penilaian kinerja secara daring pada tanggal 18 Mei 2022. Tujuan dari kegiatan orientasi teknis ini adalah: 1) memberikan informasi mekanisme pelaksanaan uji public instrument penilaian kinerja, sehingga LKP dapat mengisi instrument pada aplikasi dan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebelum pelaksanaan uji public di LKP; 2) menanyakan kesiapan LKP untuk menjadi LKP sasaran penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja tahun 2022.



#### d. Penetapan LKP Sasaran Penilaian Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memilih 200 LKP yang menjadi sasaran program penilaian kinerja. Calon sasaran ini dipilih dari peserta berbagai program Direktorat Kursus dan Pelatihan, seperti PPKSDM, Penyelenggara Program PKK dan PKW, TUK, TEFA, serta usulan dari organisasi mitra. Untuk melakukan pemilihan ini dilibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, akademisi, dan praktisi. Hasil yang dicapai adalah terpilihnya 200 LKP yang menjadi sasaran penilaian kinerja.



#### e. Orientasi Teknis Verifikator Penilaian Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 7 s.d 9 Juni 2022. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara verifikator dan validator penilaian kinerja atas: 1) mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja; 2) instrument penilaian kinerja; 3) system aplikasi penilaian kinerja.

Hasil yang dicapai adalah verifikator dan validator yang siap menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam penyelenggaraan penilaian kinerja.



## 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pelaksanaan program penilaian kinerja ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

### a. Verifikasi

Kegiatan ini merupakan tahap verifikasi atas isian LKP pada aplikasi penilaian kinerja dengan cara melakukan kunjungan ke LKP dan mewawancarai pengelola dan/atau instruktur LKP. Petugas verifikator yang terlibat adalah para tenaga fungsional pada 7 UPT (B/BB PPMPV). Dilaksanakan pada rentang waktu sejak tanggal 20 Juni s.d 16 Juli 2022. Sebelum pelaksanaan kegiatan verifikasi ini, dilaksanakan orientasi teknis secara daring kepada 200 LKP yang menjadi sasaran penilaian kinerja pada tanggal 10 dan 11 Juni 2022, secara berkelompok berdasarkan kelompok penugasan 7 UPT (B/BB PPMPV). Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang: 1) mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja; 2) instrument penilaian kinerja; 3) system aplikasi penilaian kinerja; dan 4) petugas verifikasi sesuai penugasan 7 UPT (B/BB PPMPV).



#### b. Validasi

Kegiatan ini merupakan tahap validasi atas isian verifikator pada aplikasi penilaian kinerja dengan cara melakukan kunjungan ke 7 UPT (B/BB PPMPV) dan mewawancarai para verifikator. Petugas validasi adalah tim penilaian kinerja pusat yang telah ditetapkan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan. Dilaksanakan pada rentang waktu sejak tanggal 18 Juli s.d. 11 Agustus 2022.



Setelah kegiatan validasi ini selesai, dari system aplikasi penilaian kinerja diperoleh hasil penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja tahun 2022 dalam 3 kategori, yaitu 52 LKP dengan kategori A, 64 LKP dengan kategori B, dan 84 LKP dengan kategori C. Hasil ini kemudian ditetapkan dengan terbitnya SK Direktur Kursus dan Pelatihan dan diumumkan melalui pertemuan daring dengan melibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, akademisi, praktisi, 7 UPT (B/BB PPMPV), dan LKP beserta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat pada tanggal 25 Oktober 2022.

### 3. Evaluasi Program Penilaian Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor pada tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2022. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penilaian kinerja, solusi yang diambil, serta Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan program ini tahun depan. Dalam kegiatan ini dilibatkan unsur Direktorat Kursus dan Pelatihan, akademisi, praktisi, dan 7 UPT (B/BB PPMPV). Dari kegiatan ini diperoleh laporan pelaksanaan program penilaian kinerja dan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan program.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Sebaran LKP yang ada di 34 provinsi sementara anggaran dan sumber daya manusia (verifikator pusat) terbatas baik

Penggunaan sistem aplikasi yang baru, masih dalam tahap pengembangan



## STRATEGI/INOVASI

Melakukan evaluasi terhadap system aplikasi penilaian kinerja yang sudah sesuai dilaksanakan dan melakukan perbaikan serta pengembangan system secara berkelanjutan

Optimalisasi peran UPT Ditjen Diksi yang ada di 7 wilayah yaitu di Medan, Cimahi, Cianjur, Depok, Yogyakarta, Malang, dan Gowa, untuk melakukan penilaian kinerja (Widyaprada, Widyaiswara, dan PTP)

## 6

## Jumlah Instruktur dan Pengelola LKP Magang di Dunia Kerja



### CAPAIAN 2022



**25**  
Lembaga

Program Magang Instruktur LKP di Dunia Kerja adalah program yang bertujuan untuk menyelaraskan kompetensi teknis instruktur dengan kompetensi terbaru, teknologi termutakhir, budaya, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri.

Pelaksanaan Magang Instruktur yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1

**Kurasi Magang SDM  
Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja**

2

**Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Magang SDM  
LKP Berbasis Dunia Kerja**

3

**Penyusunan Perangkat Pelaksanaan Program Magang SDM  
LKP Berbasis Dunia Kerja**

4

**Orientasi Teknis Pelaksanaan Magang SDM  
LKP Berbasis Dunia Kerja Kelompok**

5

**Magang Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan  
LKP Berbasis Dunia Kerja**

6

**Orientasi Teknis Pelaksanaan Magang SDM  
LKP Berbasis Dunia Kerja Kelompok**

7

**Magang Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan  
LKP Berbasis Dunia Kerja Tahap II**

## 1. Kurasi Magang SDM Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja (11-13 April 2022, Arch Hotel, Bogor)

- Bertujuan untuk mengkurasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) beserta instruktur dan juga industri yang memenuhi persyaratan serta kriteria tertentu untuk menyelenggarakan program Magang Instruktur Berbasis Dunia Kerja Tahun 2022.
- Output:
  - a) Data lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan calon sasaran kegiatan magang
  - b) Data instruktur yang memenuhi persyaratan calon sasaran kegiatan magang
  - c) Data industri yang memenuhi persyaratan calon sasaran sebagai calon mitra kegiatan magang
  - d) Draf pedoman magang instruktur berbasis dunia kerja.
- Hasil kegiatan:



- a) Terpilihnya 25 instruktur dari 25 lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program magang
- b) Terpilihnya 4 industri dengan 4 bidang keterampilan yang berbeda sebagai tempat pelaksanaan program magang tahun 2022
- c) Tersusunnya draft pedoman pelaksanaan magang.

## 2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Magang SDM LKP Berbasis Dunia Kerja (17-19 April 2022, Hotel Swissbel, Serpong)

- Bertujuan menyusun konsep dan pedoman penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia LKP melalui kegiatan magang berbasis dunia kerja.
- Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Magang yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk program magang LKP.



## 3. Penyusunan Perangkat Pelaksanaan Program Magang SDM LKP Berbasis Dunia Kerja (19-21 Mei 2022, Hotel Grand Tjokro, Bandung)

- Kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat sebagai bagian dari pelaksanaan program magang dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia LKP melalui Magang berbasis Dunia Kerja tahun 2022.
- Hasil dari kegiatan ini adalah:
  - a) Tersusunnya tim kepanitiaan Ditsuslat
  - b) Terbentuknya desain kegiatan magang
  - c) Tersusunnya perangkat pembelajaran magang seperti jadwal, materi dan jumlah jam pelajaran.

d) Ditandatangani MOU dengan industri tempat magang.



No	Uraian	Volume	Keterangan
<b>Honorarium</b>			
1	a. Supervisor industri	1 orang	1 Kegiatan
	a. Pendamping/mentor	1 - 2 orang*)	1 Kegiatan
2	Perlengkapan peserta (Seragam peserta sesuai dengan bidang keterampilannya dan untuk proses)	Sesuai jumlah peserta magang	1 Kegiatan
3	Akomodasi dan konsumsi, uang harian dan transportasi peserta	Sesuai jumlah peserta magang	1 Kegiatan

1. Jumlah pendamping sebanyak 1 orang untuk 4 peserta magang, dan 2 orang untuk peserta lebih dari 7 peserta magang

2. Ketentuan pembiayaan sepenuhnya telah disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

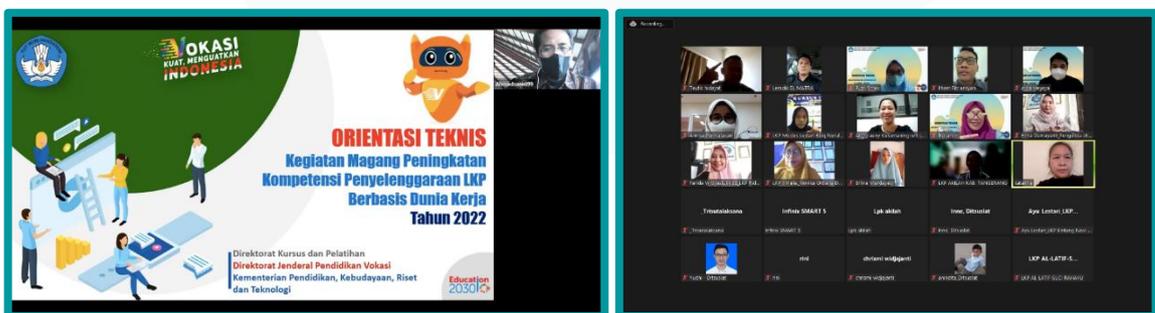
3. Panitia tidak menyediakan peralatan/keperluan standar/dasar selama magang seperti laptop dan alat praktik lainnya

#### 4. Orientasi Teknis Pelaksanaan Magang SDM LKP Berbasis Dunia Kerja Kelompok Solo (8 Juli 2022, Daring)

- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau arahan terhadap peserta magang dalam melaksanakan kegiatan Magang SDM LKP Tahun 2022 bidang keterampilan Digital Marketing dan Tata Busana.
- Dihadiri oleh tim Ditsuslat Pokja I, perwakilan industri dari PT. Kusuma Kreasi Utama dan PT Sri Rejeki Isman, 4 peserta bidang

Digital Marketing didampingi pengelola, 9 peserta bidang Tata Busana didampingi pengelola, serta praktisi dan akademisi.

- Hasil kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kepada calon peserta selama melaksanakan kegiatan Magang SDM LKP kepada peserta dan industri dalam magang bidang Tata Busana dan Digital Marketing.



## 5. Magang Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan LKP Berbasis Dunia Kerja Tahap I

- Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kompetensi teknis instruktur dengan kompetensi terbaru, teknologi termutakhirkan, budaya, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri.

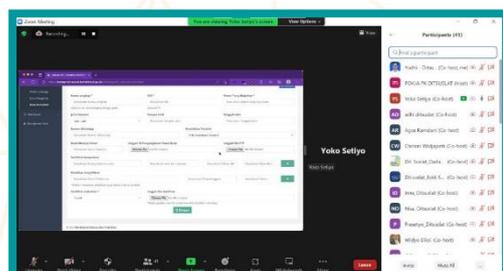


Selama 10 hari peserta melaksanakan magang, 2 hari di hotel kegiatan pembukaan dan penutupan dan 8 hari efektif peserta magang langsung di industri sesuai jam kerja, yaitu jam 08.00 – 16.00 WIB. Setiap hari peserta berangkat dari hotel jam 07.00 WIB menuju perusahaan tempat magang dan kembali sampai di hotel jam 17.00 WIB. Setelah istirahat peserta mengikuti kegiatan pembimbingan dan pendampingan pengisian jurnal harian dan rencana tindak lanjut (kegiatan teori, praktik, penugasan dan pelaporan dalam pengisian jurnal SIMantap) sambil berdiskusi tentang kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan bersama pendamping dari DUDI dan dari Direktorat Kursus.



## 6. Orientasi Teknis Pelaksanaan Magang SDM LKP Berbasis Dunia Kerja Kelompok Bandung (20 Juli 2022, Daring)

- Bertujuan untuk memberikan gambaran atau arahan terhadap peserta magang dalam melaksanakan kegiatan Magang SDM LKP Tahun 2022 bidang keterampilan Desain Grafis dan Tata Kecantikan Rambut.
- Hasil kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kepada calon peserta



selama melaksanakan kegiatan Magang SDM LKP kepada peserta dan industri dalam magang bidang Desain Grafis dan Tata Kecantikan Rambut.

## 7. Magang Peningkatan Kompetensi Penyelenggaraan LKP Berbasis Dunia Kerja Tahap 2

- Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kompetensi teknis instruktur dengan kompetensi terbaru, teknologi termutakhirkan, budaya, dan karakter yang diterapkan di dunia kerja/industri.
- Selama 10 hari peserta melaksanakan magang, 2 hari di hotel kegiatan pembukaan dan penutupan dan 8 hari efektif peserta magang



Magang di Sasana Solusi Digital

langsung di industri sesuai jam kerja, yaitu jam 08.00 – 16.00 WIB. Setiap hari peserta berangkat dari hotel jam 07.00 WIB menuju perusahaan tempat magang dan kembali sampai di hotel jam 17.00



WIB. Setelah istirahat peserta mengikuti kegiatan pembimbingan dan pendampingan pengisian jurnal harian dan rencana tindaklanjut (kegiatan teori, praktik, penugasan dan pelaporan dalam pengisian jurnal SIMantap) sambil berdiskusi tentang kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan bersama pendamping dari DUDI dan dari Direktorat Kursus.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Sulitnya mencari DUDIKA yang menjadi mitra tempat pelaksanaan magang dikarenakan belum seluruh DUDIKA memiliki bagian yang bertanggung jawab secara khusus mengurus pelaksanaan magang

Waktu pelaksanaan terbatas karena terkait dengan anggaran yang tersedia sehingga mengakibatkan kedalaman materi yang diberikan oleh trainer magang industri kurang optimal



## STRATEGI/INOVASI

Bekerja sama dengan Asosiasi Profesi dan organisasi mitra dalam melakukan identifikasi, analisis, dan penentuan DUDIKA pelaksana magang

Menyusun rencana tindak lanjut dan pendampingan pasca magang dari DUDIKA kepada peserta magang

7

## Jumlah Penguji Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya



### CAPAIAN 2022



**26**  
Orang

Pelatihan calon penguji uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan bekerjasama dengan Asosiasi Profesi. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan pertemuan selama 3 hari. Materi yang diberikan selama pelatihan adalah materi dasar evaluasi, rubrik penilaian dan tata cara menilai pada penyelenggaraan uji kompetensi. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya penguji uji kompetensi yang kompeten pada bidang keterampilan barista, broadcasting, dan digital marketing.



### HAMBATAN DAN KENDALA

Pengukuran hasil pelatihan penguji uji kompetensi kurang maksimal karena proses penyampaian materi melalui daring tidak interaktif sehingga kurang optimal

Kurangnya jumlah penguji untuk jenis keterampilan terkini (barista) yang memiliki kompetensi berstandar DUDIKA



## STRATEGI/INOVASI

Bagi peserta pelatihan yang belum optimal penerimaan materinya dilakukan pendampingan penguatan sampai dinyatakan kompeten

Diadakan pelatihan pengujian untuk jenis keterampilan barista sesuai dengan standar DUDIKA

# 8

## Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya



### CAPAIAN 2022



**136**  
Orang

Pelatihan pengelola uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan bekerja sama dengan Asosiasi Profesi terakit. Tujuan dari kegiatan guna mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi dan aplikasi penyelenggaraan uji kompetensi kepada lembaga sertifikasi kompetensi.

Kegiatan peningkatan kompetensi pengelola uji kompetensi ini dihadiri oleh operator uji kompetensi di setiap lembaga sertifikasi kompetensi dan Asosiasi Profesi. Kegiatan dilaksanakan dalam 3 hari pertemuan tatap muka. Output



dari kegiatan ini adalah kebijakan-kebijakan terkait peningkatan layanan program uji kompetensi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan dan meningkatkan kompetensi para pengelola uji kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi uji kompetensi serta memberikan pengetahuan terkait kebijakan program uji kompetensi.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Belum dapat memfasilitasi semua asosiasi profesi yang bermitra dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan karena mengingat banyaknya asosiasi profesi yang ada

Belum adanya mekanisme monitoring rencana tindak lanjut yang disusun oleh peserta kegiatan penguatan peningkatan kompetensi pengelola uji kompetensi



## STRATEGI/INOVASI

Konsep kegiatan menggunakan blended dengan menggabungkan webinar dengan pertemuan tatap muka. Webinar dipakai untuk memfasilitasi asosiasi yang tidak dapat hadir secara tatap muka dan mereka tetap bisa mendapatkan informasi dan berinteraksi secara virtual

Monitoring rencana tindak lanjut dilakukan secara informal dan beririsan dengan kegiatan penilaian kinerja LSK

# 9

## Jumlah LKP yang Menyelenggarakan Program RPL dengan Perguruan Tinggi



### CAPAIAN 2022

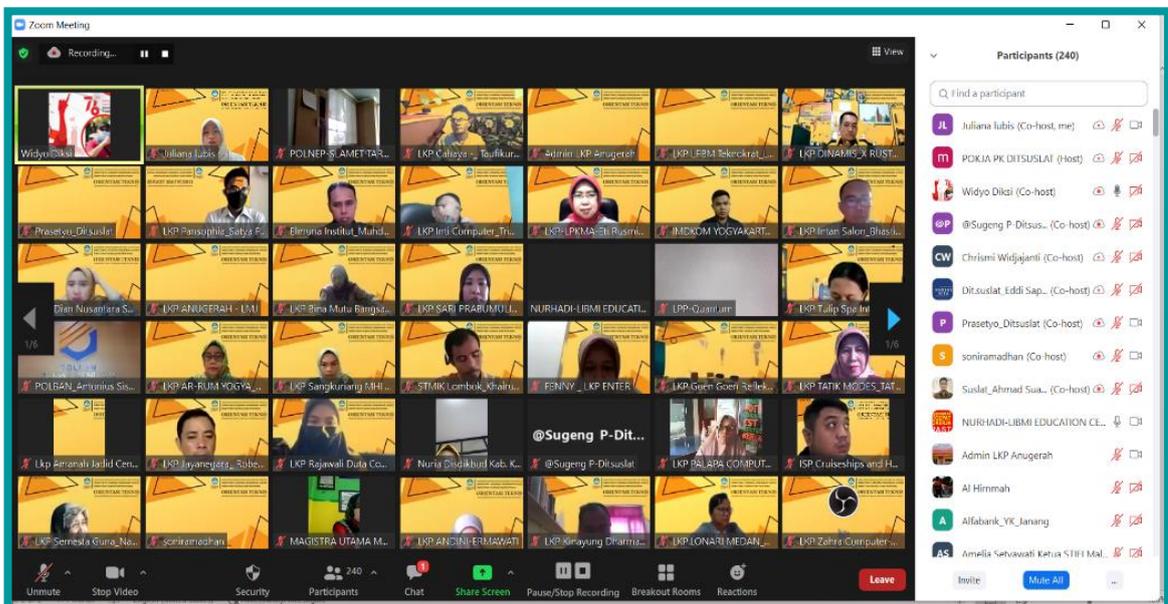


**54**  
Lembaga

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pengakuan atas capaian pembelajaran dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi untuk disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.



Pelaksanaan RPL yang sudah dilakukan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



### **1. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan Perguruan Tinggi (PT) bagi LKP Tahun 2022 (Luring, 18 s.d 20 Agustus 2022)**

- Kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022 bertujuan untuk menyusun konsep dan pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi lulusan LKP di perguruan tinggi.
- Output  
Melalui kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022 meliputi:

- a. Konsep pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau lulusan LKP di perguruan tinggi.
- b. Pedoman pelaksanaan kerjasama Rekognisi Pembelajaran Lampau lulusan LKP di perguruan tinggi.
- c. Mekanisme pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau lulusan LKP di perguruan tinggi.
- d. Daftar LKP piloting pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau lulusan LKP di perguruan tinggi tahun 2022.

## 2. Sosialisasi Pedoman RPL Tahun 2022 (Daring, 29 Agustus 2022)

- Kegiatan Sosialisasi Pedoman RPL bagi Lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Perguruan Tinggi dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengelola program RPL dengan benar, sesuai aturan, terjamin mutunya, dan menjadi bagian dari program pengembangan karier bagi para lulusan LKP.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pedoman RPL Bagi Lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Perguruan Tinggi terdiri dari:
  - a. 115 Perguruan Tinggi
    - Universitas Negeri & Swasta
    - Politeknik Negeri & Swasta
    - Akademik
    - Sekolah Tinggi
    - Institut
  - b. 324 LKP
    - 23 Bidang keterampilan yg sdh mengikuti Pelatihan PPKSDM Tahun 2020

- Instruktur memiliki pengalaman/dilatih industri yang mengikuti kegiatan magang tahun 2022
- Akses Banper

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Interview/Wawancara LKP Terkait Program RPL (Daring, 5 s.d 6 September 2022)

- Kegiatan Interview/wawancara LKP calon peserta pendampingan/piloting kerjasama RPL bagi lulusan LKP di Perguruan Tinggi (PT) negeri/swasta adalah bertujuan untuk:
  - a. Mendapatkan informasi tentang beberapa bentuk kerjasama yang selama ini telah terjalin antara LKP dengan perguruan tinggi.
  - b. Mendapatkan informasi mekanisme dan bentuk kerjasama yang selama ini terjalin antara LKP dengan PT; khususnya dalam rangka layanan alumni LKP studi lanjut di perguruan tinggi.
  - c. Mengetahui sejauh mana kesiapan dan kesanggupan LKP untuk menjadi \*calon peserta pendampingan kerjasama RPL untuk alumni LKP di perguruan tinggi.
- Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Interview/wawancara sebanyak 37 LKP calon peserta pendampingan/piloting kerjasama RPL
- Kegiatan interview ini di bagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan selama 2 hari (tahap I dan Tahap II).

### 4. Persiapan Pendampingan Kerja Sama Penyelenggaraan RPL (Daring, 15 September 2022)

- Kegiatan Persiapan Pendampingan Kerjasama Penyelenggaraan RPL bagi Lulusan LKP di Perguruan Tinggi dilaksanakan adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme dan strategi kerjasama

penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi lulusan LKP di perguruan tinggi dibawah binaan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek.

- Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Persiapan Pendampingan Kerjasama Penyelenggaraan RPL bagi Lulusan LKP di Perguruan Tinggi terdiri dari:
  - a. Tim dari Pokja Pengembangan dan Kelembagaan
  - b. LKP sebanyak 25 yang sudah dilakukan seleksi/terpilih:
  - c. Narasumber:
    - 1) Prof. Dr. Dra. Kokom Komariah, M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta
    - 2) Dr. Harmanto, Universitas Negeri Surabaya
    - 3) Ahmad Suaidi, Tim Teknis

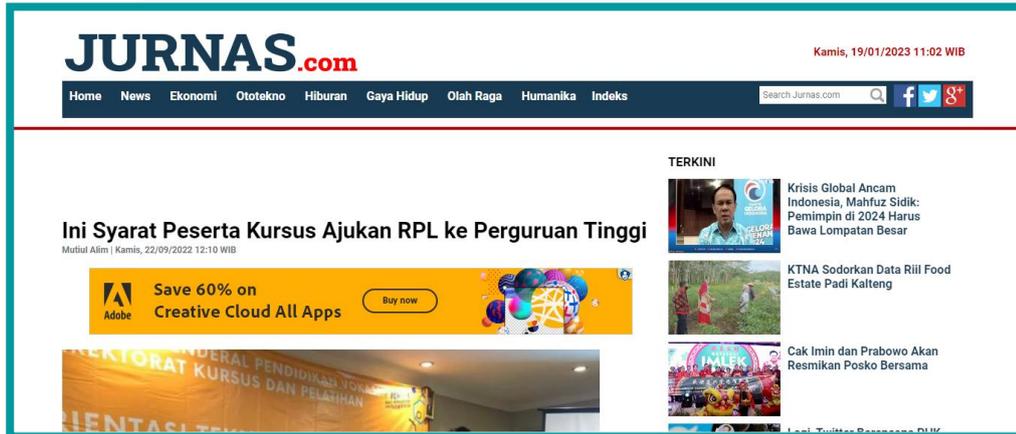
#### **5. Kegiatan Orientasi Teknis Kerjasama Penyelenggaraan RPL Bagi LKP dan PT (Luring, 21 s.d 23 Sept 2022).**

Dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 54 LKP yg sudah difasilitasi untuk bekerja sama dengan 4 Perguruan Tinggi yaitu: UT, UNESA, UNJ dan UNY.

Dihadiri oleh Media Pers:

- a. Unsur media yang hadir secara Luring:
  1. Jurnas, Muti;
  2. Media Indonesia, Syarif Oebaidillah;
  3. Medcom, Citra;
- b. Unsur media yg hadir secara Daring (Zoom Meeting):
  1. Beritasatu.com;
  2. Tribunnews.com;
  3. Waspada;

4. Sumatera Ekspres;
  5. Poskota.co;
  6. Menara 62;
  7. Jawa Pos;
- c. Siaran Pers:



<https://www.jurnas.com/artikel/124180/Ini-Syarat-Peserta-Kursus-Ajukan-RPL-ke-Perguruan-Tinggi/>



<https://www.indopos.co.id/nasional/2022/09/21/lkp-tak-salah-dirjen-diksi-program-rpl-ptn-bukan-cuci-ijazah/>



[https://www.antaraneews.com/berita/3131897/kemendikbudristek-pengakuan-rpl-tak-kurangi-kualitas-pendidikan?utm\\_medium=mobile](https://www.antaraneews.com/berita/3131897/kemendikbudristek-pengakuan-rpl-tak-kurangi-kualitas-pendidikan?utm_medium=mobile)



<https://menara62.com/lulusan-lembaga-kursus-dapat-melanjutkan-ke-perguruan-tinggi-melalui-program-rpl/>

## 6. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022 (Luring, 16 s.d 18 November 2022)

- Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022 adalah bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait dengan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- Melalui Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022 meliputi:

- a. Tercapainya Sosialisasi Penyelenggaraan LKP Dengan Perguruan Tinggi Kerjasama Rekognisi Pembelajaran Lampau
- b. Terfasilitasi Kerja Sama RPL LKP Dengan Perguruan Tinggi Oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan
- c. Tercapainya Capaian Kerja Sama RPL LKP Dengan Perguruan Tinggi
- d. Tercapainya Tindaklanjut Kerja Sama RPL 54 LKP Dengan Perguruan Tinggi
- e. Finalisasi Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) LKP dengan Perguruan Tinggi



## HAMBATAN DAN KENDALA

Program Pembelajaran/kurikulum yang disiapkan oleh LKP sebagian besar belum memenuhi kaidah dan standar dokumen kurikulum sehingga pihak perguruan tinggi kesulitan untuk mengetahui jumlah jam pelajaran, kedalaman materi, dan linieritas dengan program studi. Hal ini menjadi kendala dalam menentukan konversi kedalam jumlah SKS

Sebaran geografis LKP dengan Perguruan Tinggi mitra cukup lebar, sehingga cakupan layanan RPL terbatas

Terdapat beberapa LKP yg sdh melakukan kerja sama baik dengan Perguruan Tinggi negeri/swasta namun belum sesuai dengan hukum atau aturan yang ada



## STRATEGI/INOVASI

Sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh alumni program kursus dan pelatihan menjadi bahan pertimbangan pangakuan untuk dikonversi menjadi SKS

Rekognisi Pembelajaran/Pengalaman Lampau menjadi solusi masalah LKP yang lebih dari dua dekade terkendala dalam pengakuan lulusan program kursus satu tahun dan dua tahun. Meskipun alumni dari program kursus satu tahun dan dua tahun, dunia kerja mengakuinya sama dengan lulusan kursus 2 atau 3 bulan. Melalui RPL memungkinkan lulusan program kursus satu tahun dan dua tahun dapat diakui setara dengan diploma satu/dua

# 10

## Jumlah LKP yang Mempunyai Pusat Pengembangan Karir



### CAPAIAN 2022



**30**  
Lembaga

Jumlah LKP yang memiliki pusat pengembangan karir pada tahun 2022 adalah sebanyak 30 lembaga. Pusat pengembangan karir ini adalah unit pelaksana di LKP yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi

peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja. Selain itu juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia kerja terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia kerja, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan.

Adapun daftar LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Daftar LKP Percontohan Pusat Pengembangan Karir Tahun 2022

No	Nama LKP	Jenis Keterampilan
1	OTC Bali	Perhotelan
2	LKP Pansophia	Perhotelan
3	BPLE Tiara Course	Teknik Sepeda Motor
4	LKP Alfabank	Digital Marketing
5	El Rahma Education Centre	Komputer
6	LKP IHCT-BANDUNG	Perhotelan
7	KARYA DUTA EDUCATION	Desain Grafis
8	Graha Wisata Surakarta	Perhotelan
9	LKP Nakamura	Refleksi
10	LKP Eka Mulya	Tata Busana
11	LP3I Surabaya	Administrasi & Akuntansi
12	Magistra Utama Kediri	Administrasi Perkantoran
13	LKP Surya Farma Husada	Babysitter
14	LIBMI Education Center	Komputer
15	LKP Desy Education	Perhotelan
16	Lasalle College Surabaya	Tata Busana
17	LKP Enter	Administrasi Perkantoran
18	LKP Prisma Pangkalan Bun	Komputer
19	IDEA Indonesia	Perhotelan
20	LKP Jayanegara	Komputer
21	LKP P4M	Akuntansi
22	LPKN Mataram	Perhotelan
23	LKP Dende	Tata Kecantikan Kulit & Spa
24	LKP Riau International College	Pramugari
25	LKP Riau Cipta Mekanik	Teknik Kendaraan Ringan
26	Bina Mutu Bangsa	Perhotelan
27	LKP Itech	Komputer
28	IMDKOM YOGYAKARTA	Teknisi Komputer
29	LKP ISMIA	Tata Busana
30	LKP INASABA	Teknik Komputer



## HAMBATAN DAN KENDALA

Mayoritas LKP yang menjadi *piloting project* belum mempunyai pemahaman yang standar terkait mekanisme, pola layanan dan jenis program pengembangan karir bagi peserta didik maupun lulusan LKP

Mayoritas LKP belum memiliki divisi yang secara khusus mengelola program pengembangan karir bagi lulusan dan peserta didik, sehingga pada saat penerapan pedoman memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mereposisi struktur organisasi LKP dengan memasukkan divisi pengembangan karir beserta peran dan tanggung jawabnya

Jenis layanan program pengembangan karir yang selama ini dilaksanakan tidak bervariasi, mayoritas menganggap bahwa hanya proses magang sebagai layanan pengembangan karir bagi peserta didik/alumni

Masih minimnya kerjasama dan kemitraan LKP dengan platform digital pencari kerja

Lemahnya kebiasaan LKP untuk melakukan *tracer studi* sehingga menyebabkan tidak ada terdokumentasikannya lulusan atau alumni LKP yang bekerja di dunia industri



## STRATEGI/INOVASI

Menyajikan informasi secara holistic/menyeluruh terkait prosedur, mekanisme, jenis layanan, dan penjaminan mutu dari penyelenggaraan pusat pengembangan karir di LKP

Pedoman disertai contoh – contoh, video, dan link best practice program pengembangan karir dari beberapa LKP unggulan

Aplikasi yang tergabung pada SIMANTAP yang berisi pedoman dan isian yang mengukur sampai sejauh mana penyelenggaraan pusat pengembangan karir terselenggara di LKP agar lebih paham dan mengerti tentang pengembangan karir yang diperlukan Lembaga

Melakukan sosialisasi disertai pendampingan agar LKP dapat secara jelas menggambarkan posisi dari struktur organisasi yang tepat dalam pengembangan karir

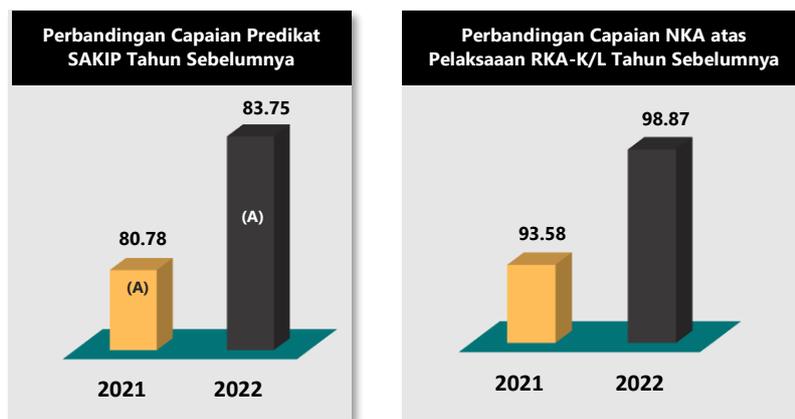
Pada pelaksanaan pusat pengembangan karir dengan cara melakukan tracer study terhadap lulusan LKP yang masih menganggur dengan memiliki data lulusan setiap tahun bekerja/berwirausaha sehingga waktu tunggu setelah lulus juga dapat menjadi perbandingan LKP dalam penyerapan tenaga kerja



### SASARAN KEGIATAN 3

#### Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan

Tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan selama tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Capaian sasaran kegiatan ini ditandai dengan peningkatan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan yang dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



Pada tahun 2022 Predikat SAKIP yang diperoleh Direktorat Kursus dan Pelatihan adalah A dengan nilai 83,75 sementara Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,87 hasil capaian tahun 2022 ini cenderung meningkat dibandingkan capaian di tahun sebelumnya. Adapun keberhasilan dari capaian pada sasaran ini diukur oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan

1

## Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan



<b>TARGET 2022</b>
<b>A</b>
<b>CAPAIAN 2022</b>
<b>A (83,75)</b>

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPANRB No.12 Tahun 2015 dengan berdasar pada 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja 30%

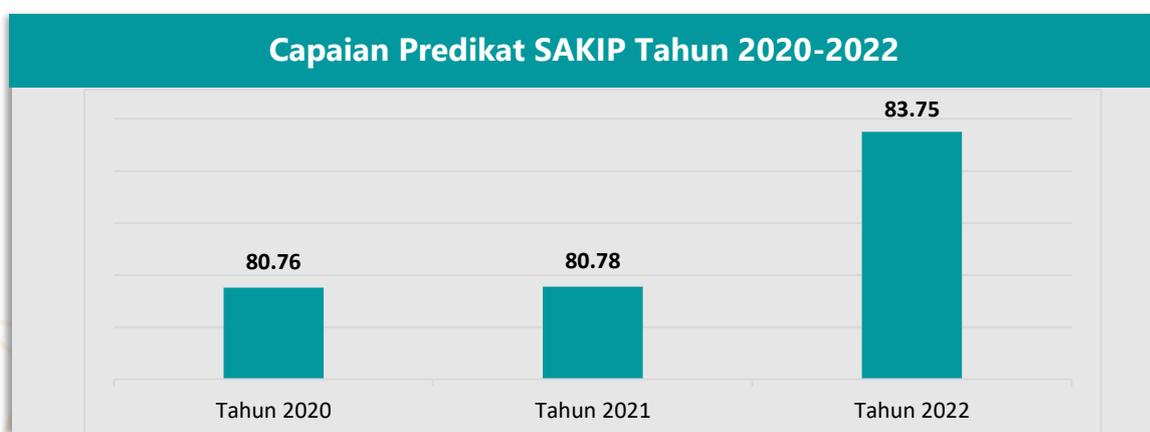
2. Pengukuran Kinerja 25%

3. Pelaporan Kinerja 15%

4. Evaluasi Internal 10%

5. Capaian Kinerja 20%

Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan menetapkan target predikat SAKIP yaitu A dan berhasil mencapai predikat SAKIP sesuai target yaitu A dengan nilai 83,75.



## Metode Penghitungan

$$I = 30\% A + 30\% B + 15\% C + 25\% D$$

### Keterangan

- A : Perencanaan Kinerja
- B : Pengukuran Kinerja
- C : Pelaporan Kinerja
- D : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Satuan : Predikat
- Unit Pelaksana : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Sumber Data : Spasikita
- Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Direktorat Kursus dan Pelatihan secara berkala melakukan evaluasi internal untuk melihat faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada seluruh stakeholder melalui berbagai program.

Dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kursus dan Pelatihan Tahun 2022, ditargetkan nilai predikat satker minimal A dan telah terealisasi nilai SAKIP di tahun 2022 yaitu A dengan total nilai sebesar 83,75. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021 terjadi peningkatan nilai capaian sebesar 3,75 poin. Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai lingkungan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Realisasi IKK yang melampaui target ini disebabkan oleh:

1. Pencapaian nilai komponen sakip yang meliputi perencanaan kinerja, pengukurankinerja, plaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian

sasaran/ kinerja organisasi seluruhnya telah memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan.

2. Proses pengumpulan data pada aplikasi SPASIKITA dapat dilakukan sesuai dengan kriteria dan dilaksanakan tepat waktu.
3. Dilakukan evaluasi internal secara rutin dengan melibatkan seluruh kelompok kerja sehingga kekurangan dalam pelaksanaan program dapat dipantau dengan baik dan dijadikan sebagai bahan kontrol pengambilan keputusan berikutnya.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Pada rapat koordinasi dan evaluasi antar pimpinan di unit kerja direktorat kursus dan pelatihan di setiap awal bulan dan triwulan secara luring terdapat kendala yaitu sulitnya menemukan waktu untuk melakukan rapat



## STRATEGI/INOVASI

Rapat koordinasi dilakukan secara *blended* (daring dan luring) dengan menggunakan media *zoom meeting*

## 2

## Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan



<b>TARGET 2022</b>
<b>93,58</b>
<b>CAPAIAN 2022</b>
<b>98,87</b>

Pada tahun 2022, capaian realisasi pada tahun ini sebesar 98,87 yang melampaui target awal yaitu 93,58 dan karena itu presentase capaian realisasinya sebesar 105,65%.



### Metode Penghitungan

$$I = 40\% \text{ Nilai IKPA} + 60\% \text{ Nilai EKA}$$

#### Keterangan

- a. Nilai IKPA : Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran. Nilai IKPA ada 3 indikator, yaitu:
- Kualitas Perencanaan Anggaran
  - Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
- b. Nilai EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran. Nilai EKA ada 4 indikator, yaitu:
- Penyerapan anggaran
  - Konsistensi
  - Capaian output
  - Efisiensi
- a. Unit Pelaksana : Direktorat Kursus dan Pelatihan
- b. Sumber Data : Spasikita
- c. Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pada satuan kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA.

Dari serangkaian proses penyusunan tersebut kemudian dihasilkan RKA-KL Direktorat Kursus dan Pelatihan yang tertuang dalam Kode 23.18.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Output 4278.QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, 4278.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, dan 023.18.WA Program Dukungan Manajemen, sesuai dengan tabel berikut ini.

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
23.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			100,818,410,000
4.278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan			100,818,410,000
4278.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100	Lembaga	12,157,475,000
4278.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	100	Lembaga	12,157,475,000
57	Penyusunan SKL dan Kurikulum	-		4,408,075,000
58	Pembentukan Master Penguji, Penguji, LSK, dan TUK	-		1,220,950,000
59	Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan berbasis industri	-		6,528,450,000
4278.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	17,164	Orang	88,660,935,000
4278.QDC.U01	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	10,000	Orang	43,833,810,000
U55	Pemberian bantuan Kerja			42,500,000,000
U51	Penyusunan dan Penggandaan Pedoman/Kurikulum, Bahan ajar			79,849,000
U52	Sosialisasi / Koordinasi Penyelenggara Program PKK			73,175,000
U53	Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKK			313,100,000
U54	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK			496,100,000
U56	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKK			84,130,000
U57	Verifikasi dan pengolahan Laporan			11,850,000
U58	Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan			120,000,000
U59	Penyusunan, penggandaan dan sosialisasi Best Practice PKK			155,606,000
4278.QDC.U02	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	7,164	Orang	44,827,125,000
U55	Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha			42,984,000,000
U51	Penyusunan dan Penggandaan Pedoman/Kurikulum, Bahan ajar			154,258,000
U52	Sosialisasi / Koordinasi Penyelenggara Program PKW			85,028,000
U53	Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKW			505,745,000
U54	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW			585,565,000
U56	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKW			83,470,000
U57	Verifikasi dan pengolahan Laporan			22,457,000
U58	Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan			171,152,000
U59	Penyusunan, penggandaan dan sosialisasi Best Practice PKW			235,450,000
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen			24,895,875,000
4.261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			24,895,875,000
4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	24,895,875,000
4261.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	8,212,180,000
51	Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran	-		1,584,040,000
52	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan	-		2,028,860,000
54	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	-		1,109,920,000
58	Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai	-		1,205,802,000
59	Pelayanan Umum	-		2,283,558,000
4261.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	16,683,695,000
1	Gaji dan Tunjangan	-		8,259,088,000

Dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L di Direktorat Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022, upaya yang dilakukan dengan melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran atas belanja yang digunakan pada masing-masing kelompok kerja.

Kualitas perencanaan anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 indikator yakni (1) Revisi DIPA, yang mengukur kualitas perencanaan berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja dalam satu triwulan

dan (2) Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan kelompok kerja per masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran triwulanan
2. Belanja Kontraktual, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi penerbitan kontrak
3. Penyelesaian Tagihan, yang diukur berdasarkan ketepatan Kontraktual
4. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, persentase Ganti Uang Persediaan, serta persentase setoran TUP, serta
5. Dispensasi SPM, yang diukur berdasarkan rasio SPM yang terbit dengan dispensasi di akhir tahun.

Beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Kursus dan Pelatihan yaitu dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran, penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) secara berkala atau per Triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, adanya langkah strategis dalam melakukan revaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik setiap awal triwulan untuk mengakomodasi perubahan rencana kegiatan dan kebutuhan anggarannya dapat segera disesuaikan melalui revisi, dalam menyusun revisi prosesnya harus lebih selektif dan efisien dan tetap memperhatikan pergeseran anggaran dalam kewenangan pagu tetap, dan menjaga agar pengajuan revisi

DIPA hanya dilakukan tidak lebih dari satu kali per Triwulan pada Rencana Program dan Anggaran tahun 2022.



## HAMBATAN DAN KENDALA

Dalam penetapan perhitungan capaian output teknis yang memiliki karakteristik beragam

Dari segi pelaksanaan, beberapa kegiatan tidak sesuai dengan jadwal/rencana kegiatan maupun kebutuhan idealnya

Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana

Penyerapan anggaran yang rendah, cenderung tidak proporsional yang mengakibatkan keterlambatan di akhir tahun

Pencapaian output yang dibawah target masih menjadi masalah umum pada satuan kerja



## STRATEGI/INOVASI

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal antara unit kelompok kerja dalam menetapkan perhitungan capaian output

Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap Rincian Output (RO) yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki karakteristik beragam

Secara periodik menghitung tingkat kemajuan capaian fisik dan anggaran yang telah dilakukan

Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir.

Mempercepat pelaksanaan berbagai aktivitas yang relevan dalam rangka menghasilkan output

Melakukan pengamatan dan penelaahan atas kondisi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran pada masing-masing kelompok kerja.

## REALISASI ANGGARAN



Pagu anggaran Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam DIPA tahun 2022 sebesar **Rp 290.153.641.000** dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp 289.991.407.428** dengan presentase daya serap sebesar 99,94%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Anggaran		% Realisasi Anggaran
				Target 2022	Realisasi 2022	
Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	49.896 Orang	63.785 Orang	10.842.225.000	10.821.391.151	<b>99,81</b>
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.075 Lembaga	1.273 Lembaga	255.958.296.000	255.903.000.631	<b>99,98</b>
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kursus Dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Kursus dan Pelatihan	A	A	23.353.120.000	23.267.015.646	<b>99,63</b>
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA -K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	93,5	98,87			



## Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan mempunyai Pagu Anggaran yaitu sebesar **Rp125.714.285.000,-**. Pada bulan April Direktorat Kursus dan Pelatihan mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp167.332.461.000,-** yang bersumber dari alokasi dana BA-BUN Kementerian Keuangan. Sehingga total Pagu Anggaran menjadi **Rp293.046.746.000,-**.

Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp2.893.105.000,-**. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari anggaran yang dilakukan blokir automatic adjustment (AA), anggaran tersebut digunakan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja, peningkatan efektifitas dan kualitas belanja satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, kemudian Revisi Realokasi Anggaran Blokir Direktorat Kursus dan Pelatihan diserahkan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA-BUN TA 2022.

## INOVASI DAN PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE



Salah satu keuntungan di era digital ini adalah kemudahan akses di berbagai sektor. Di masa dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti sekarang, pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan pelayanan berbasis digital. Hal inilah yang mendasari Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi, tujuannya adalah untuk memudahkan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program maupun anggaran.

## 1. Program PKK dan PKW Berbasis Online



Di tahun ini, pelaksanaan program PKK dan PKW sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online*. Inovasi ini dilakukan dalam kegiatan-kegiatan PKK dan PKW dari mulai sosialisasi, pengajuan proposal, penilaian, penetapan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Adapun salah satu teknologi yang digunakan adalah dengan penggunaan website melalui:



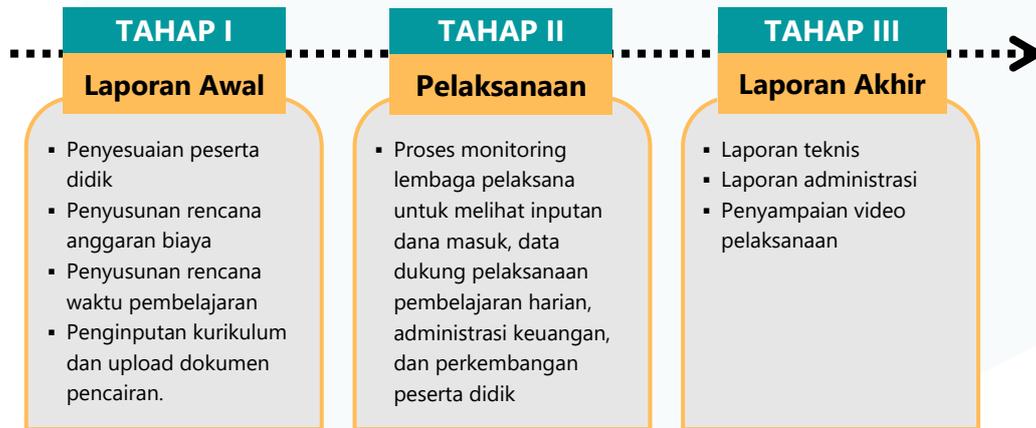
[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk)

➔ **PKK**

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkw](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkw)

➔ **PKW**

Adapun kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program PKK dan PKW yang dilakukan dengan menggunakan website tersebut adalah sebagai berikut:



Banyaknya komponen dari mulai laporan awal, pelaksanaan, hingga akhir yang perlu disampaikan telah dipermudah dengan website ini karena lembaga hanya cukup mengupload data-data sesuai ketentuan. Selain mempermudah lembaga pelaksana dalam menyampaikan data dukung, hadirnya website ini juga memudahkan Tim Teknis Program PKW dalam melakukan monitoring dan juga membentuk pola koordinasi yang lebih mudah, karena catatan perbaikan dapat langsung disampaikan melalui website tersebut dan nantinya lembaga pelaksana akan langsung menerima notifikasinya.

Selain pemanfaatan website, kegiatan seperti contohnya sosialisasi sudah menggunakan teknologi *Zoom Meeting* untuk mempermudah Direktorat dalam rangka menjangkau lebih banyak sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

## 2. Manajemen Sistem Informasi Uji Kompetensi Berbasis Online



Manajemen Sistem Informasi Uji Kompetensi Berbasis Online ini adalah inovasi yang membantu registrasi dan pendataan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Registrasi dan pendataan yang dimaksud dilakukan melalui sebuah website yang bernama SIKOMPETEN atau Sistem Informasi Uji Kompetensi melalui:

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/ujk/)



Lewat website ini, LSK akan diberikan akun yang selanjutnya digunakan untuk mengakses dan menyediakan pendaftaran peserta didik, mengatur jadwal ujian, menentukan tempat ujian, dan penyampaian nilai akhir ujian. Adapun total LSK yang telah terdaftar dalam penggunaan website ini sejumlah 43 LSK dan semuanya berpartisipasi dalam pengaturan administrasi ujian baik dalam ujian teori maupun praktik.

Inovasi ini lahir untuk menjawab salah satu kendala dimana Direktorat sulit untuk mengontrol adanya penjadwalan uji kompetensi. Pada kondisi yang sebelumnya, segala bentuk mekanisme uji kompetensi dari mulai pendaftaran hingga pengumuman dilakukan oleh LSK secara mandiri sehingga ditemukan LSK yang tidak melaksanakan ujian sesuai timeline yang ditetapkan saat perencanaan. Lewat adanya inovasi ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan dipermudah untuk melakukan kontrol dan juga monitoring terhadap penjadwalan ujian oleh LSK, selain itu peserta ujian juga diberikan kepastian jadwal ujian karena melalui sistem ini setelah melakukan pendaftaran di SIKOMPETEN, peserta ujian akan mendapatkan jadwal ujian beserta tempat ujiannya. Selain itu, hasil ujian bagi peserta juga ditampilkan di dalam SIKOMPETEN, sehingga melalui website ini proses uji kompetensi lebih terarah dari mulai proses awal sampai penyampaian output akhirnya yakni hasil nilai ujian.

### 3. SIMantap atau Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kompetensi



Di tahun 2022, pelaksanaan program-program kelembagaan kursus dan pelatihan diantaranya adalah Penilaian Kinerja Lembaga, Magang Instruktur dan Pengelola, PjBL, serta Pusat Pengembangan Karir sudah dilakukan secara online melalui website bernama SIMantap atau Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kompetensi yang bisa diakses melalui:

[banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/simantap/](https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/simantap/)



Website ini digunakan oleh internal Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mempermudah pekerjaan dalam hal monitoring pelaksanaan program. Selain itu, website ini juga berfungsi untuk pendataan lembaga yang sedang mengikuti program-program tersebut karena website ini dijadikan alternatif bank data lembaga kursus dan pelatihan. Lewat website ini, akses untuk mencari data menjadi lebih mudah dan cepat karena merupakan alternatif lain selain dari Dapodik. Selain itu, di dalam website ini juga terdapat fitur instrumen monitoring yang hasilnya akan mempermudah Direktorat dalam merekapitulasi data.



## Program *Crosscutting/Collaborative*

Program *Crosscutting/Collaborative* dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja serta mengoptimalkan capaian pada indikator kinerja kegiatan.

### 1. Kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan

<b>Program</b>	: <b>PKK dan PKW</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	: Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	: Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha
<b>Pihak yang Terlibat</b>	: 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>Capaian</b>	: - Sarana praktik kursus dan pelatihan yang berstandar petunjuk teknis PKK dan PKW - Penyerapan ATS yang telah lulus PKK dan PKW untuk bekerja dan berwirausaha di DUDIKA

**Definisi:**

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program PKK dan PKW adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan kursus dan pelatihan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS).

Kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian sarana praktik kursus dan pelatihan adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat lewat Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan upaya guna mendukung pendidikan nonformal. Pemerintah Daerah dituntut untuk mengalokasikan 20% dari APBD untuk urusan pendidikan di daerahnya masing-masing, salah satu bentuk pendidikannya adalah pendidikan nonformal lewat kursus dan pelatihan.

Lewat program PKK dan PKW lulusannya diberikan bekal untuk mempunyai kapabilitas dalam berwirausaha mandiri serta mendapatkan pekerjaan. Selain itu, juga menyumbang angka capaian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

**Tujuan:**

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga meningkatkan kualitas sarana penyelenggara kursus dan pelatihan di LKP. Selain itu, kolaborasi lewat PKK dan PKW ini juga akan menyumbang capaian untuk sasaran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran lewat pendampingan ATS melalui Program PKK dan PKW.

**Target:**

Lembaga Kursus dan Pelatihan di wilayah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten masing-masing.

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki program PKK dan PKW untuk memberikan bantuan kepada anak usia sekolah dan tidak sekolah dalam memperoleh pendidikan kecakapan kerja beserta ujian sertifikasinya, dan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal melakukan wirausaha. Di dalam pelaksanaannya, program PKK dan PKW memiliki petunjuk teknis yang didalamnya terdapat bahan dalam penentuan standar sarana pendidikan kursus dan pelatihan.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : berperan untuk memberikan bantuan anggaran pemberian sarana praktik bagi lembaga kursus dan pelatihan.

**Outcome:**

Sarana praktik yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, membantu dalam mengakomodir lebih banyak anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha. Lulusan PKK dan PKW yang terserap di dunia kerja secara tidak langsung juga turut andil dalam pencapaian program yang berupaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di masing-masing daerah yang ikut berkolaborasi.

## 2. Kolaborasi Program Teaching Factory (TEFA) bersama Stakeholders Lainnya

**Program** : **Teaching Factory (TEFA)**

<b>SK</b>	: Meningkatkan jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
<b>IKK</b>	: Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
<b>Pihak yang Terlibat</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Kursus dan Pelatihan</li> <li>2. DUDIKA</li> <li>3. Lembaga Kursus dan Pelatihan</li> </ol>
<b>Capaian</b>	: Jumlah TEFA pada LKP yang lebih berkualitas dan berbasis industri

### Definisi:

Kolaborasi Program Teaching Factory (TEFA) bersama *stakeholders* lainnya adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan berbagai pihak lainnya seperti DUDIKA dan LKP dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan TEFA di setiap LKP.

### Tujuan:

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, TEFA yang berada di LKP ini nantinya akan menjadi sebuah konsep

pembelajaran terkhusus pada LKP yang sudah berbasis produksi/jasa agar mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri

**Target:**

Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki pabrik dalam sekolah atau *Teaching Factory* (TEFA)

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki program *Teaching Factory* (TEFA) dimana di dalam program ini dilakukan pembinaan secara komprehensif bagaimana tata cara mengembangkan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan TEFA sekaligus menjadi unsur pengawas atau pemangku kepentingan lainnya.
- 2) DUDIKA : berperan untuk memberikan masukan terhadap penyelarasan kurikulum dalam TEFA yang berbasis industri
- 3) LKP : sebagai pelaksana program TEFA

**Outcome:**

TEFA pada LKP yang lebih berkualitas dan berbasis industri akan menciptakan *income generating* bagi lembaga. Selain itu, lewat TEFA pada LKP juga akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik di LKP karena sudah dilibatkan dalam pengalaman nyata berwirausaha. Sarana praktik yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, membantu dalam mengakomodir lebih banyak anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha.

### 3. Kolaborasi Pelaksanaan Program Pembelajaran Daring bersama Stakeholders Lainnya

**Program** : **Pembelajaran Daring**

**SK** : Meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

**IKK** : Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

**Pihak yang Terlibat** :  
 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan  
 2. Dunia industri dan dunia kerja  
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 4. Lembaga Kursus dan Pelatihan

**Capaian** : Produk bahan ajar kursus daring dalam bentuk video yang sudah berstandar industri

#### Definisi:

Kolaborasi Pelaksanaan Program Pembelajaran Daring bersama *stakeholders* lainnya adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan berbagai pihak lainnya seperti DUDIKA, LKP, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam rangka menciptakan metode pembelajaran kursus dan pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi atau lewat daring.

#### Tujuan:

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Program Pembelajaran Daring dapat diselenggarakan secara jarak jauh sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta didik yang memiliki keterbatasan terutama dalam konteks jarak dan waktu.

**Target:**

Lembaga Kursus dan Pelatihan

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki Program Pembelajaran Daring yang bertujuan untuk menciptakan alternatif pembelajaran kursus dan pelatihan yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Direktorat Kursus dan Pelatihan juga melakukan pembinaan lewat bimbingan teknis dengan berdasarkan kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Daring.
- 2) DUDIKA : Pemberian masukan dalam rangka penyusunan bahan ajar kursus lewat daring berdasarkan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja
- 3) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten : Memfasilitasi penyusunan bahan ajar kursus daring
- 4) LKP : Sebagai pelaksana pembelajaran daring dan membuat sarana dan bahan ajarnya secara mandiri

**Outcome:**

LKP pelaksana Program Pembelajaran Kursus Daring akan menghasilkan bahan ajar (video) yang sudah berstandar industry. Ketersediaan bahan ajar ini akan menjawab kebutuhan di era kemajuan teknologi seperti sekarang. Program Pembelajaran Kursus Daring dengan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak menghasilkan kualitas bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dunia industri

dan dunia kerja. Selain itu, peserta didik kursus juga mampu mengakses pembelajaran dimana saja sehingga waktu menjadi lebih efektif dan efisien.

#### 4. Kolaborasi DUDIKA dan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam Penempatan Lulusan PKK dan PKW

**Program** : **PKK dan PKW**

<b>Sasaran</b>	: Meningkatkan jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
<b>Kegiatan</b>	
<b>Indikator</b>	: Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
<b>Kinerja Kegiatan</b>	
<b>Pihak yang Terlibat</b>	: 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan 2. Dunia industri dan dunia kerja
<b>Capaian</b>	: Lulusan Peserta Didik Program PKK dan PKW yang langsung bekerja dan berwirausaha setelah menyelesaikan program

#### Definisi:

Kolaborasi DUDIKA dan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam penempatan lulusan PKK dan PKW adalah upaya yang dilakukan dengan cara berkoordinasi untuk menyalurkan lulusan ke pelaku dunia industri dan dunia kerja sehingga lulusan yang sudah menyelesaikan sistem pembelajaran dalam program PKK dan PKW mampu terserap dengan tepat sasaran

**Tujuan:**

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 1 yaitu meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat kolaborasi Direktorat Kursus dan Pelatihan bersama DUDIKA, lulusan dari program PKK dan PKW akan ditempatkan ke pelaku dunia industri dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja.

**Target:**

Peserta Didik Program PKK dan PKW

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki program PKK dan PKW untuk memberikan bantuan kepada anak usia sekolah dan tidak sekolah dalam memperoleh pendidikan kecakapan kerja beserta ujian sertifikasinya, dan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal melakukan wirausaha. Direktorat Kursus dan Pelatihan lewat program ini akan menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing di dunia industri dan dunia kerja.
- 2) DUDIKA : Pemberian masukan dalam pemetaan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja sekaligus menjadi mitra penyalur ke dunia industri dan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja

**Outcome:**

Kolaborasi DUDIKA dan Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam Penempatan Lulusan PKK dan PKW ini memberikan kepastian dan kesempatan lulusan peserta didik untuk mampu menerapkan hasil pembelajaran di kehidupan nyata dalam pekerjaan. Selain itu, lewat kolaborasi dalam jangka panjang akan memberikan jaminan kepada lulusan peserta didik PKK dan PKW mampu terserap langsung di

dunia industri dan kerja sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kursus dan pelatihan

### 5. Kolaborasi Program RPL dan Akademi Komunitas dengan Perguruan Tinggi Vokasi dan Direktorat KLSDPV

**Program : Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	: Meningkatkan Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	: Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
<b>Pihak yang Terlibat</b>	: 1. Direktorat Kursus dan Pelatihan 2. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi 3. Perguruan Tinggi
<b>Capaian</b>	: Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berpartisipasi pada Program RPL dan Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas

#### Definisi:

Kolaborasi Program RPL dan Akademi Komunitas dengan Perguruan Tinggi dan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam pelaksanaan program yang ada di Direktorat Kursus dan

Pelatihan melalui Program RPL dan Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas. Untuk memaksimalkan capaian Program RPL, Direktorat Kursus dan Pelatihan melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran kursus dan pelatihan sehingga dapat direkognisi oleh pendidikan formal di Perguruan Tinggi.

Sedangkan dalam Program Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan capaiannya adalah dengan cara berkoordinasi dengan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi bersama dengan Perguruan Tinggi untuk memetakan lembaga yang berpotensi untuk dijadikan Akademi Komunitas dan juga berkoordinasi dalam menganalisa apa saja yang menjadi persyaratan dalam pembentukan Akademi Komunitas.

**Tujuan:**

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lewat Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas.

**Target:**

Lembaga Kursus dan Pelatihan

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki program RPL dan transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas yang di dalamnya terdapat pedoman pelaksanaan program

- 2) Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi : memberikan masukan dalam merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan tranformasi LKP menjadi Akademi Komunitas
- 3) Perguruan Tinggi: memberikan masukan dan informasi terkait kurikulum yang ada di perguruan tinggi yang bisa diintervensi sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dengan kurikulum pendidikan kursus dan pelatihan, selain itu memberikan masukan terhadap perumusan petunjuk teknis pelaksanaan transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas

**Outcome:**

Kolaborasi antara Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Perguruan Tinggi Vokasi dalam mengoptimalkan capaian pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Transformasi LKP menjadi Akademi Komunitas ini memberikan kepastian dan kesempatan lulusan peserta didik kursus dan pelatihan untuk dapat dilakukan diakui penyetaraan kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki di pendidikan formal.

## 6. Kolaborasi Program Penilaian Kinerja Lembaga dengan BBPPMPV

**Program** : Program Penilaian Kinerja Lembaga

**Sasaran** : Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang  
**Kegiatan** sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	:	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
<b>Pihak yang Terlibat</b>	:	1. Direktorat Kursus dan Pelatihan 2. BBPPMPV
<b>Capaian</b>	:	Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan yang berpartisipasi dalam Program Penilaian Kinerja Lembaga

**Definisi:**

Kolaborasi Program Penilaian Kinerja Lembaga dengan BBPPMPV adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam Program Penilaian Kinerja Lembaga sehingga mampu memaksimalkan capaiannya. BBPPMPV yang tersebar di wilayah Indonesia akan membantu Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk memetakan penilaian kinerja lembaga berdasarkan wilayah BBPPMPV yang tersebar di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan penilaian kinerja lembaga ini juga akan dipermudah lewat pembagian peran dengan BBPPMPV.

**Tujuan:**

Mengoptimalkan capaian pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lewat Program Penilaian Kinerja Lembaga.

**Target:**

Lembaga Kursus dan Pelatihan

**Peran:**

- 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan : memiliki program penilaian kinerja lembaga sehingga mampu mengetahui dan mengukur kualitas lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan kursus dan pelatihan yang berstandar industri
- 2) BBPPMPV : memiliki wilayah yang tersebar di Indonesia sehingga akan membantu memverifikasi penilaian kinerja lembaga di wilayahnya masing-masing

**Outcome:**

Kolaborasi antara Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan BBPPMPV ini akan menghasilkan catatan penilaian kinerja lembaga sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya dan juga untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan agar memiliki standar sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.



# BAB IV

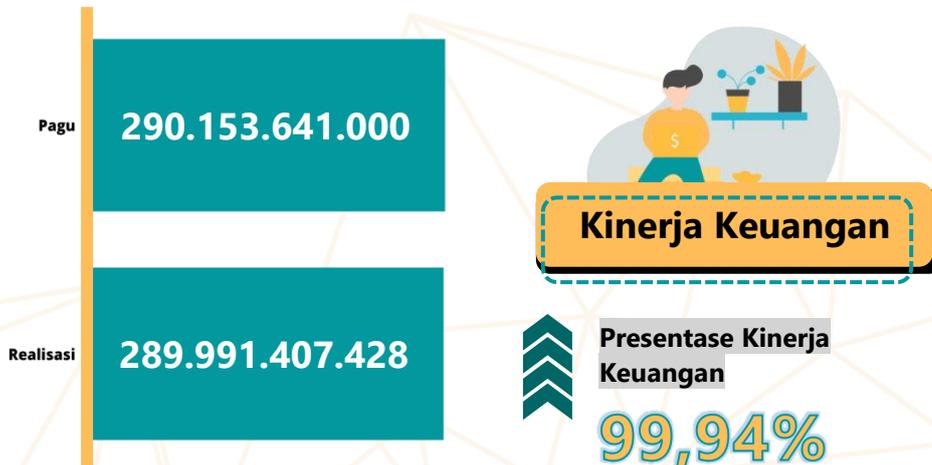
## Penutup



## Penutup

Selama tahun 2022, Direktorat Kursus dan Pelatihan berhasil melaksanakan program atau kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Sehingga jika melihat realisasi pada seluruh IKK, capaiannya berhasil sesuai dan terdapat tiga IKK yang capaiannya melampaui target. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Lulusan Kursus dan Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	[1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	49.896 Orang	63.785 Orang	127,83%
Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	[2.1] Meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1.075 Lembaga	1.273 Lembaga	118,41%
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[3.1] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Kursus dan Pelatihan	A	A	100%
	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA -K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	93,5	98,87	105,74%





## KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1

Masih terbatasnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kursus dan pelatihan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2

Pasca pandemi covid 19, lowongan pekerjaan di beberapa sektor masih terbatas bagi *entry level* yang menjadi sasaran program PKK pandemi covid-19 di beberapa bidang keterampilan

3

Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti DUDIKA, Perguruan Tinggi, dan K/L terkait dalam program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) sehingga pelaksanaan program menjadi kurang fokus, integratif, efisien dan efektif

4

Ada keterlambatan dalam penetapan penerima bantuan PKK dan PKW karena menunggu proposal dari daerah afirmasi

5

Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi



## UPAYA

1

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop* dan seminar baik secara luring, daring maupun *hybrid* tentang peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pendampingan kursus dan pelatihan program

2

Mengembangkan kemitraan dengan DUDIKA dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop*, seminar, DUDIKA *gathering*, meningkatkan keterlibatan aktif DUDIKA dan proses belajar mengajar, tempat magang, pendampingan dan penyerapan lulusan

3

Meningkatkan koordinasi dengan DUDIKA, Perguruan Tinggi dan K/L terkait dalam bentuk sosialisasi, diskusi terpumpun, *workshop* dan seminar serta pemberian penghargaan baik secara luring, daring maupun *hybrid* tentang program kursus dan pelatihan (PjBL, TEFA, RPL) serta peran dan bentuk kerjasama apa saja yang bisa dilaksanakan bersama agar program kursus dan pelatihan menjadi lebih fokus, integratif, efisien dan efektif

4

Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dengan daerah afirmasi secara daring untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam mengakses program PKK dan PKW

5

Menyusun analisis dan rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi *online* berbasis teknologi informasi agar bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program serta penyesuaian dan pengembangan fitur secara periodik



# LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan  
Dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Wartanto**

**Jabatan : Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Wikan Sakarinto**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan**



**Wikan Sakarinto**



**Wartanto**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	17.164
2	[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1.075
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	93.5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 100.818.410.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 24.895.875.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 125.714.285.000</b>

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan**



**Wikan Sakarinto**



**Wartanto**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Kursus dan Pelatihan  
Dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Wartanto**

**Jabatan : Direktur Kursus dan Pelatihan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Kiki Yuliati**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yuliati**



**Wartanto**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	49896
2	[SK 2] Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	1075
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	93.5

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 266.800.521.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 23.353.120.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 290.153.641.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,**

**Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Kiki Yulianti**



**Wartanto**



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	orang	17164	TW1 : 2740 TW2 : 17164 TW3 : 17164 TW4 : 17164	TW1 : 9980 TW2 : 34417 TW3 : 62945 TW4 : 63785	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Sudah disahkan petunjuk teknis program PKK dan PKW di tanggal 2 Februari 2022 2. Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal program PKK tahap 1 sebanyak 1616 peserta didik, tahap 2 sebanyak 1711 peserta didik, tahap 3 sebanyak 1756 peserta didik, tahap 4 sebanyak 2157 peserta didik. Dengan total jumlah peserta sebanyak 7240 orang peserta didik. 3. Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal program PKW tahap 1 sebanyak 1065 peserta didik, tahap 2 sebanyak 1200 peserta didik, tahap 3 sebanyak 285 peserta didik, tahap 4 sebanyak 190 peserta didik. Dengan total jumlah peserta sebanyak 2740 peserta didik. Kelebihan capaian dari target yang ditetapkan disebabkan karena petunjuk teknis dapat diselesaikan lebih awal sehingga proposal dapat masuk lebih cepat dengan jumlah melebihi target yang ditetapkan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Terjadi keterlambatan pencairan di bulan maret karena adanya perubahan sistem pencairan di aplikasi SAKTI.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Proses verifikasi dan penetapan dilakukan sebelum peluncuran program, sehingga pada saat program diluncurkan secara resmi, proses sudah memasuki tahap pencairan dana. 2. Berkoordinasi secara intensif dengan KPPN terkait kendala di aplikasi SAKTI</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal program PKK, tahap 5 sebanyak 1607 peserta didik, tahap 6 sebanyak 1489 peserta didik, tahap 7 sebanyak 1538 peserta didik, tahap 8 sebanyak 641, tahap 9 sebanyak 6234, tahap 10 sebanyak 745 peserta didik. PKK Platinum tahap 1 sebanyak 328 peserta didik, tahap 2 sebanyak 100 peserta didik, tahap 3 sebanyak 84 peserta didik. Dengan total jumlah peserta sebanyak 12.766 orang peserta didik. 2. Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal program PKW tahap 5 (Platinum) sebanyak 440 peserta didik, tahap 6 sebanyak 1480 peserta didik, tahap 7 sebanyak 1165 peserta didik, tahap 8 sebanyak 1606 peserta didik, tahap 9 sebanyak 4015, tahap 10 sebanyak 2965. Dengan total jumlah peserta sebanyak 11.671 peserta didik. Peralaksanaan melebihi target ini dikarenakan adanya penambahan target sasaran yang bersumber dari dana BA-BUN dari sebelumnya 17164 menjadi 49896.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Adanya penambahan sasaran dan anggaran yang bersumber dari dana BA-BUN harus merevisi kembali target per bulan dan rencana perrealisasiannya.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan revisi rencana penarikan dana dan melakukan percepatan verifikasi penetapan proposal agar tercapai sasaran PKK sebesar 30.000 peserta didik dan PKW sebesar 19.896</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Program PKK: 1). Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal penyelenggara program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Juli tahap 11 sebanyak 5406 peserta didik, tahap 12 sebanyak 1508 peserta didik, tahap 13 sebanyak 1525 peserta didik, tahap 14 sebanyak 6733 peserta didik, tahap 15 sebanyak 2306 peserta didik, tahap 16 sebanyak 2712 peserta didik, tahap 17 sebanyak 741 peserta didik, tahap 4 (platinum) sebanyak 15 peserta didik. Dengan total peserta didik sebanyak 20946. 2). Bimtek penyelenggaraan Program PKK tahap 4 diikuti 26 lembaga secara daring dan 107 lembaga secara daring, tahap 5 diikuti 26 lembaga secara daring dan 101 lembaga secara daring, tahap 6 diikuti 26 lembaga secara daring dan 120 lembaga secara daring, pada bulan agustus dilaksanakan bimtek tahap 7 diikuti 34 lembaga secara daring dan 268 lembaga secara daring, tahap 8 diikuti 34 lembaga secara daring dan 268 lembaga secara daring Program PKW: 1). Dilakukan sosialisasi program PKW ke Dekranas untuk 5 provinsi pada bulan Juli (Jambi, NTB, NTT, Bali, Sumatera Utara) 2). Dilakukan verifikasi dan penetapan proposal penyelenggaraan PKW: Bulan Juli Tahap 11 sebanyak 2.980 peserta didik, tahap 12 sebanyak 875 peserta didik, tahap 13 sebanyak 834 peserta didik, tahap 14 sebanyak 830 peserta didik. Bulan Agustus tahap 15 sebanyak 1.133 peserta didik, tahap 16 sebanyak 930 peserta didik. Dengan total jumlah peserta didik sebanyak 7582. 3). Dilakukan bimtek penyusunan laporan akhir program PKW regional Jateng, Jatim, DIY (21 Lembaga), regional platinum (21 Lembaga), regional Sumatera (23 Lembaga) pada bulan september 4). Monitoring dan evaluasi Lembaga penerima program PKW tahun 2022 sebanyak 43 Lembaga pada bulan agustus 5). Dilakukan bimtek lembaga penerima banper PKW tahap 11 (147 Lembaga terdiri dari 20 lembaga secara daring dan 127 secara daring), tahap 12,13,14 (119 Lembaga terdiri dari 20 Lembaga secara daring dan 99 lembaga secara daring), tahap 15 (53 Lembaga terdiri dari 20 lembaga secara daring dan 33 lembaga secara daring), tahap 16 (untuk Dekranas terdiri dari 5 provinsi)</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Program PKK: 1). Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya Program PKW: 1). Kendala pada saat proses bimbingan teknis yang dilakukan daring dimana kita tidak bisa memantau lembaga penerima benar-benar menyimak dan menerima materi dengan baik 2). Banyak lembaga yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran namun belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya 3). Untuk kerjasama Dekranas, terdapat dua provinsi yang kabupaten/kota nya mengundurkan diri</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Program PKK: 1). Dilakukan coaching dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKK pada aplikasi banper baik laporan teknis maupun administrasi keuangan. Program PKW: 1). Direktorat memfasilitasi ruang diskusi bagi lembaga melalui grup whatsapp PKW 2). Dilakukan coaching dalam evaluasi pelaporan pelaksanaan PKW pada aplikasi banper 3). Kuota peserta didik dari kabupaten/kota yang mengundurkan diri dialihkan ke kabupaten/kota lain (Provinsi Sumatera Selatan)</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Program PKK - Pemberian dana bantuan PKK tahap 18 sebanyak 770 peserta didik 2. Program PKW : Pemberian dana bantuan PKW tahap 17 sebanyak 70 peserta didik</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Program PKK : Terjadi keterlambatan penetapan tahap akhir hingga bulan oktober karena menunggu daerah afirmasi 2. Program PKW : Terjadi keterlambatan penetapan tahap akhir hingga bulan oktober karena menunggu daerah afirmasi</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Program PKK : jadwal pembelajaran dipadatkan hingga sampai uji kompetensi dan penempatan kerja 2. Program PKW : jadwal pembelajaran dipadatkan hingga merintis usaha sendiri</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

2	[SK 2.0] Meningkatkan lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	lembaga	1075	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 550 <b>TW3</b> : 840 <b>TW4</b> : 1075	<b>TW1</b> : 136 <b>TW2</b> : 996 <b>TW3</b> : 1273 <b>TW4</b> : 1273	<p><b>TW1 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Tahap menyusun draft SL, KBK dan Bahan Ajar. 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Tahap menyusun draft pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Tahap mengkoordinasikan pertemuan jenjang keterampilan dan judul naskah bahan ajar. 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Tahap menyusun pedoman penyelenggaraan unit produksi sebagai teaching factory. 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: tahap menyusun pedoman dan naskah akademik. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: tahap menyusun pedoman kegiatan magang pengelola LKP di dunia kerja. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tahap memetakan calon peserta pelatihan. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah melaksanakan pelatihan untuk 136 orang terdiri dari 86 orang dilatih secara luring dan 50 orang dilatih secara daring. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Tahap berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk kesiapan penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Tahap melakukan koordinasi dengan mitra dari iduka. 11. Jumlah LKP yang menyelenggarakan microcredential: tahap melakukan koordinasi dengan dikti dan perguruan tinggi hasilnya program ini tidak dilanjutkan di tahun 2022 karena tidak menjadi program prioritas serta diperlukan inisiatif dari PT dan LKP</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Belum ada standar format baku yang diatur dalam PP 57 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Program merupakan program baru maka masih mencari pola yang tepat untuk kursus dan pelatihan. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Tidak ada kendala karena masih dalam proses koordinasi. 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Program merupakan program baru maka masih mencari konsep dan pola yang tepat untuk kursus dan pelatihan. 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Terdapat perubahan konsep dan pola penilaian kinerja dari yang sudah dilaksanakan di tahun 2009 - 2012. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Belum menemukan pola pelaksanaan magang di dunia kerja yang tepat dan sesuai kebutuhan. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: pengujian yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan pengujian Uji kompetensi yang memenuhi kriteria masih di bawah target yang ditetapkan. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah sasaran yang ditetapkan tidak tercapai. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Masih menunggu kesiapan perguruan tinggi yang akan bekerjasama untuk implementasi program ini. 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir : Belum menemukan pola pelaksanaan pengembangan karir yang tepat dengan dunia kerja yang sesuai kebutuhan. 11. Jumlah LKP yang menyelenggarakan microcredential: program ini tidak dilanjutkan di tahun 2022</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: kompetensi pembelajaran masih menggunakan format lama, sementara capaian pembelajaran menggunakan format baru yang sudah mengacu di PP 57. 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Dengan meminta gambaran dan masukan teknis pelaksanaan PjBL kepada stakeholder terkait (SMK, LKP, akademisi, dan praktisi). 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Dengan meminta gambaran dan masukan teknis pelaksanaan Teaching Factory kepada stakeholder terkait (SMK, LKP, akademisi, dan praktisi). 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Konsep disesuaikan dengan kebijakan dikti dengan mengacu kepada kebijakan 8 + i dan polanya menggunakan Balai Besar Pengembangan dan Pejaminan Mutu Pendidikan Vokasi dengan pendekatan wilayah. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: meningkatkan koordinasi dengan pihak dunia kerja, LKP, SMK, praktisi dan akademisi. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: meningkatkan sosialisasi melalui laman dan media sosial direktorat kursus dan pelatihan serta dengan TUK terdekat. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: pelatihan dilakukan dengan metode blended learning. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Terus melakukan koordinasi dan sosialisasi ke perguruan tinggi. 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Dengan meminta gambaran dan masukan teknis pelaksanaan pengembangan karir kepada stakeholder terkait (SMK, LKP, akademisi, dan praktisi). 11. Jumlah LKP yang menyelenggarakan microcredential: program ini tidak dilanjutkan di tahun 2022</p> <p><b>TW2 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Tahap revisi draft SKL, penyusunan draft KBK dan finalisasi bahan ajar pelatihan pengujian uji kompetensi. 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Tahap kurasi LKP pelaksana PjBL, didapatkan sebanyak 27 LKP yang layak menyelenggarakan PjBL, orientasi teknis pelaksanaan PjBL, pendampingan pelaksanaan PjBL. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Tahap menyusun, finalisasi naskah bahan ajar dan persiapan produksi video bahan ajar. 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan kursus daring dengan jumlah peserta tahap 1 luring sebanyak 22 peserta daring sebanyak 297 lembaga, tahap 2 luring 23 peserta daring sebanyak 291 lembaga. 5. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Tahap finalisasi pedoman penyelenggaraan unit produksi sebagai teaching factory dan kurasi lembaga calon penerima bantuan TeFA, didapatkan 149 LKP. 6. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: tahap penetapan LKP sasaran penilaian kinerja sebanyak 200 lembaga, pelaksanaan uji publik instrumen penilaian kinerja, orientasi teknis LKP dan verifikasi, persiapan pelaksanaan penilaian kinerja. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: tahap menyusun perangkat pelaksanaan kegiatan magang pengelola LKP di dunia kerja, penetapan LKP calon peserta magang sebanyak 25 lembaga dan IDUKA sebanyak 4 perusahaan. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tahap pelaksanaan bimtek pengujian uji kompetensi sebanyak 26 orang untuk jenjang keterampilan video editing, pemasaran digital, barista. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Akan dilakukan rapat untuk melanjutkan diskusi pengelolaan uji kompetensi. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Tahap berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk kesiapan penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Tahap menyusun pedoman pengembangan karir: Peralaisian melalui target disebabkan teknis pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara blended (luring dan daring) untuk beberapa kegiatan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Dalam penyusunan kurikulum terdapat anggota tim penyusun bidang fotografi yang kurang memiliki kapasitas dalam menyusun kurikulum karena ybs adalah praktisi profesional. 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Pemahaman implementasi pelaksanaan PjBL di LKP masih terbatas. Meskipun sesungguhnya LKP sudah melaksanakan dan mengimplementasikan PjBL. Keterbatasan sarana dan prasarana LKP dalam pelaksanaan PjBL sebagaimana yang dilakukan PjBL di SMK dan Politeknik. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Naskah 1 jenis keterampilan yakni digital marketing masih belum final. 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Waktu untuk penyeberan dan pengisian instrumen sangat sedikit sehingga belum dapat menjangkau lembaga yang lebih banyak jumlahnya. 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Sulit menetapkan jadwal verifikasi karena pelaksanaan adalah pihak UPT; pihak lembaga yang akan dinilai kinerja yang akan verifikasi dari UPT; aplikasi yang digunakan baru kurang familiar untuk digunakan oleh lembaga yang dinilai kinerjanya dan verifikasi. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Proses pemilihan IDUKA sebagai tempat magang tidak semua IDUKA bersedia menjadi tempat magang; pemilihan instruktur LKP melalui daring ada beberapa keterbatasan informasi. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: terdapat satu peserta yang belum memenuhi syarat kompetensi pengujian uji kompetensi bidangnya. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: belum ditemukan waktu yang tepat untuk melakukan diskusi lanjutan pengelolaan uji kompetensi. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Masih menunggu kesiapan perguruan tinggi yang akan bekerjasama untuk implementasi program ini. 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir : Banyak lembaga yang belum paham tentang pengelolaan pusat pengembangan karir.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: penggantian anggota tim penyusun kurikulum bidang fotografi dengan praktisi kursus dan pelatihan di bidang fotografi yang memahami teknis penyusunan kurikulum. 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Akan diadakan pelatihan PjBL kepada 27 LKP sasaran secara daring. Dilakukan pendampingan tahap 2. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Meningkatkan koordinasi dengan penyusun naskah bahan ajar jenis keterampilan digital marketing. 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Mengoptimalkan data lembaga yang masuk untuk dilakukan proses kurasi secara lebih ketat. 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Memperpanjang waktu pelaksanaan penilaian kinerja menyesuaikan dengan jadwal UPT sebagai pelaksana; melakukan ortek untuk mengenalkan lembaga dengan calon verifikator dari UPT; dibuatkan group whatsapp sebagai media komunikasi untuk diskusi proses pemanfaatan aplikasi dalam penilaian kinerja. 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: bekerjasama dengan organisasi mitra yang memiliki data IDUKA; calon peserta magang sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi satuan LKP melalui pengisian aplikasi simantap. 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: peserta yang belum memenuhi syarat kompetensi mengikuti remedial dengan diberikan tugas-tugas tambahan. 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: berkoordinasi dengan pihak LSK dan organisasi profesi untuk menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan rapat lanjutan. 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Terus melakukan koordinasi dan sosialisasi ke perguruan tinggi. 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Membuat pedoman yang lebih terperinci dan dilakukan sosialisasi pada LKP tentang pengelolaan pusat pengembangan karir.</p> <p><b>TW3 : Progress / Kegiatan :</b>  11. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: Pada bulan Juli, dilakukan review kurikulum, validasi kurikulum, validasi butir soal uji kompetensi dan evaluasi kinerja LSK. Di bulan Agustus, dilakukan evaluasi SKL, uji publik SKL. Di bulan September, dilakukan finalisasi SKL dan finalisasi kurikulum 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Dilakukan pendampingan ke LKP sasaran yang akan melaksanakan PjBL pada awal Juli. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Dilakukan bimtek penyelenggaraan kursus daring ke-3 diikuti 23 lembaga pada bulan Juli, dan finalisasi hasil penyusunan bahan ajar kursus daring dengan jumlah 25 judul untuk keterampilan multimedia, barista, pemasaran digital, dan tata busana 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Pendampingan Lembaga Calon Penyelenggara TEFA Tahun 2022 dalam Rangka Uji Publik Pedoman Peningkatan Kapasitas LKP Berbasis Dunia Kerja (5 provinsi: Kota medan, Sumut, Kota Denpasar, Bali, Kota Mataram, NTB, Kota Jambi, Jambi, Kab. Sumba Timur, NTT) 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: Bulan Juli dilakukan program penilaian kinerja, pelaksanaan penilaian kinerja dengan sasaran sebanyak 200 LKP (Juli sebanyak 189 LKP, Agustus sebanyak 11 LKP) 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Bulan Juli dilakukan kegiatan orientasi teknis sebanyak 25 LKP dan dilakukan program magang tahap 1 sebanyak 13 LKP. Bulan Agustus dilakukan pelaksanaan program magang sebanyak 12 LKP 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan dan pengumuman kelulusan dengan peserta sebanyak 26 orang 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Dilakukan kegiatan pertemuan tatap muka dan daring untuk peningkatan kompetensi pengelolaan oleh sebanyak 136 lembaga 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: Di bulan Agustus dilakukan penyusunan pedoman RPL dengan Perguruan Tinggi bagi LKP Tahun 2022, dilakukan sosialisasi pedoman RPL Tahun 2022. Di bulan September pelaksanaan kegiatan interview/wawancara LKP terkait program RPL, persiapan pendampingan kerja sama penyelenggaraan RPL dan kegiatan orientasi teknis kerja sama penyelenggara RPL bagi LKP dan PT. Total LKP yang bekerja sama dengan PT dalam program RPL sebanyak 54 LKP dan ditetapkan di SK 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Di bulan Juli dilakukan kurasi LKP pelaksana pusat pengembangan karir, di bulan Agustus dilakukan pendampingan LKP pelaksana pusat pengembangan karir</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: ada beberapa penyusunan yang berhalangan hadir, terdapat perwakilan dari DUDI yang berhalangan hadir untuk melakukan evaluasi SKL maupun kurikulum 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Pemahaman implementasi pelaksanaan PjBL di LKP masih terbatas. Meskipun sesungguhnya LKP sudah melaksanakan dan mengimplementasikan PjBL. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Menunggu penyelesaian penyusunan editing bahan ajar kursus daring 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Ditemukan lembaga yang TEFA nya masih belum terpisah dengan ruang pembelajaran lembaga, produk yang dihasilkan oleh TEFA tidak linier dengan jenis keterampilan lembaga 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: aplikasi yang digunakan masih baru sehingga masih kurang optimal dan butuh fitur tambahan sampai proses percepatan sertifikat 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: pada saat persiapan terdapat kendala untuk menetapkan industri dikarenakan tidak memiliki data akurat, setelah penetapan LKP ditemukan LKP yang mengundurkan diri dikarenakan terdapat instruktur yang menjadi guru sekolah formal 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Waktunya pelaksanaan pelatihannya perlu ditambah karena waktu 3 hari belum maksimal 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak semua bisa diakomodir untuk diundang dalam kegiatan tatap muka 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: terdapat banyak LKP namun dalam memenuhi persyaratan dilakukannya PKS sangat terbatas, karena banyak LKP yang terletak di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota sehingga PT yang berada di kota tersebut sulit untuk dijangkau, terdapat beberapa LKP yang sudah berupaya melakukan kerja sama baik dengan perguruan tinggi negeri atau swasta namun belum sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku, proses asesmen program pembelajaran cenderung lama karena umumnya program dari LKP jumlah pembelajarannya tidak ada standar 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Belum terstrukturnya pengembangan karir di dalam organisasi LKP sehingga belum ada petugas atau staff yang memiliki tanggung jawab di bidang pengembangan karir, Saat ini LKP masih terbatas penyaluran kerja ke peserta didik belum mencapai ke alumni</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Jumlah SKL, KBK dan Bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja: fasilitasi zoom meeting bagi penyusunan yang berhalangan hadir, mencari akademisi sekaligus praktisi yang bisa mewakili pihak DUDI 2. Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (Project Based Learning/PjBL): Dilakukan pendampingan ke LKP sasaran yang akan melaksanakan PjBL pada awal Juli. 3. Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran Daring: Dilakukan bimtek penyelenggaraan kursus daring ke-3 diikuti 23 lembaga pada bulan Juli, dan finalisasi hasil penyusunan bahan ajar kursus daring dengan jumlah 25 judul untuk keterampilan multimedia, barista, pemasaran digital, dan tata busana 4. Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory: Pendampingan Lembaga Calon Penyelenggara TEFA Tahun 2022 dalam Rangka Uji Publik Pedoman Peningkatan Kapasitas LKP Berbasis Dunia Kerja (5 provinsi: Kota medan, Sumut, Kota Denpasar, Bali, Kota Mataram, NTB, Kota Jambi, Jambi, Kab. Sumba Timur, NTT) 5. Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaga: perlu dilakukan pengembangan pada aplikasi 6. Jumlah instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: melakukan riset sendiri untuk mencari industri yang sesuai dengan bidang keterampilan yang akan diikutkan dalam magang, dan berusaha mencari pengganti LKP yang mengundurkan diri 7. Jumlah pengujian Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Menggunakan metode blended setelah 3 hari offline, selanjutnya diberikan penugasan via daring 8. Jumlah Pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Menambah sesi virtual meeting untuk lembaga yang tidak terfasilitasi/terakomodir 9. Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi: sehingga dilakukan verifikasi dan validasi untuk memenuhi target LKP, dibutuhkan kerja sama dengan PT yang menggunakan pembelajaran via daring atau blended contohnya UT di beberapa daerah, sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan perjanjian kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan analisa terhadap kurikulum serta melihat jenis keterampilan dan jam pelajaran di LKP sehingga dapat membuat konversi ke SKS nya 10. Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Dengan melakukan sosialisasi disertai pendampingan agar LKP dapat secara jelas menggambarkan posisi dari struktur organisasi yg tepat dalam pengembangan karir, LKP didorong untuk melakukan tracer study terhadap lulusan LKP yang masih menganggur dengan memiliki data tahun bekerja/berrusaha sehingga waktu tunggu setelah lulus juga dapat menjadi perbandingan LKP dalam penyerapan tenaga kerja</p> <p><b>TW4 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Jumlah SKL, Kurikulum dan Bahan Ajar yang sesuai kebutuhan dunia kerja: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3 2) Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja: Di bulan november, dilakukan pendampingan PjBL (Project Based Learning) tahap kedua kepada 16 LKP dengan menggunakan instrumen yang disediakan. 3) Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran kursus Dalam Jaringan (Daring): Dilaksanakan monitoring penyelenggaraan kursus daring di bulan november sebanyak 24 LKP 4) Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory di LKP: Di bulan november, pendampingan dalam rangka uji publik penyelenggaraan teaching factory 5) Jumlah LKP yang dinilai Kinerja Lembaga: Di bulan oktober, dilaksanakan evaluasi program penilaian kinerja LKP berbasis dunia kerja 6) Jumlah Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Akan diadakan evaluasi program magang di bulan desember 7) Jumlah pengujian Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3 8) Jumlah pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Sudah selesai dilaksanakan di triwulan 3 9) Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan perguruan tinggi: Di bulan november diadakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan program RPL 10) Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Dilakukan pendampingan untuk 10 LKP yang menjadi sasaran program pusat pengembangan karir, terdapat 10 LKP</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1) Jumlah SKL, Kurikulum dan Bahan Ajar yang sesuai kebutuhan dunia kerja: Tidak ada kendala/permasalahan 2) Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja: Masih terdapat lembaga penyelenggara PjBL yang belum memenuhi seluruh tahapan dalam pedoman 3) Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran kursus Dalam Jaringan (Daring): Jaringan internet kurang memadai baik bagi peserta didik maupun lembaga penyelenggara, hasil video yang dibuat belum maksimal karena keterbatasan perangkat yang tersedia dan kompetensi SDM dalam memanfaatkan perangkat tersebut, keterbatasan durasi video menyebabkan alur proses pembelajaran kurang lengkap 4) Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory di LKP: tidak ada kendala/permasalahan 5) Jumlah LKP yang dinilai Kinerja Lembaga: Terdapat satu lembaga yang tidak puas terhadap hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat 6) Jumlah Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Instrumen evaluasi belum dipersiapkan 7) Jumlah pengujian Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada kendala/permasalahan 8) Jumlah pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada kendala/permasalahan 9) Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan perguruan tinggi: Belum mengetahui sejauh mana pelaksanaan RPL di 5 Perguruan Tinggi yang sudah bekerjasama dengan Direktorat terkait implementasi sinkronisasi SKS dan Asesmen Peserta Didik, belum mengetahui seberapa banyak peserta didik kursus yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi tersebut dengan program RPL ini 10) Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Belum terstrukturnya pengembangan karir di dalam organisasi LKP, kejelasan MoU LKP dengan dunia kerja yang tidak dilaksanakan secara penuh karena ditandatangani dengan penyusunan program kerja pertahunnya selama minimal 3 tahun</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1) Jumlah SKL, Kurikulum dan Bahan Ajar yang sesuai kebutuhan dunia kerja: Tidak ada strategi karena sudah selesai di triwulan 3 2) Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja: Dilakukan monitoring implementasi PjBL untuk mengukur tingkat pemahaman lembaga terhadap program PjBL. 3) Jumlah LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran kursus Dalam Jaringan (Daring): Perlu tambahan sarana penunjang, perlu menumbuhkan inovasi kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran melalui pendampingan dengan SEAROLEC 4) Jumlah LKP yang menyelenggarakan unit produksi sebagai teaching factory di LKP: Tidak ada strategi/tindak lanjut 5) Jumlah LKP yang dinilai Kinerja Lembaga: Meminta lembaga untuk mendeskripsikan ketidaksiapan penilaian dari instrumen penilaian kinerja dan melakukan evaluasi instrumen penilaian kinerja 6) Jumlah Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja: Akan dibuat instrumen untuk evaluasi program magang instruktur dan pengelola di IDUKA 7) Jumlah pengujian Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada strategi karena sudah selesai di triwulan 3 8) Jumlah pengelola Uji Kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya: Tidak ada strategi karena sudah selesai di triwulan 3 9) Jumlah LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan perguruan tinggi: Perlu dilakukan koordinasi dengan 5 Perguruan Tinggi yang sudah bekerjasama dengan Direktorat terkait implementasi sinkronisasi SKS dan Asesmen Peserta Didik, perlu disiapkan mekanisme pendataan peserta didik kursus yang melanjutkan ke perguruan tinggi dengan program RPL 10) Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir: Mencari metode yang tepat untuk monitoring implementasi pelaksanaan program LKP sebagai pusat pengembangan karir, mendorong LKP melakukan koordinasi dengan IDUKA mitranya dan membuat program kerja dan melakukan pertemuan berkala minimal 3 bulan sekali</p>
3	[SK 3.0] Meningkatkan tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Kursus dan Pelatihan	Predikat	A	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : A	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : A	<p><b>TW1 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi antar pimpinan di unit kerja direktorat kursus dan pelatihan di setiap awal bulan dan triwulan secara luring. 2. Melakukan reviu renstra direktorat kursus dan pelatihan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Terdapat koordinator yang tidak bisa hadir secara luring karena sudah memiliki agenda kegiatan di luar jakarta 2. Renstra unit kerja belum dapat difinalkan karena menunggu pengesahan renstra kemendikbud dan rancangan renstra direktorat jenderal pendidikan vokasi.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Rapat dilakukan secara blended (daring dan luring) dengan menggunakan media zoom meeting. 2. Percepatan perbaikan renstra mengacu pada renstra dirjen pendidikan vokasi dan renstra kemendikbud.</p> <p><b>TW2 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi antar pimpinan di unit kerja direktorat kursus dan pelatihan di setiap awal bulan dan triwulan secara luring. 2. Melakukan reviu renstra direktorat kursus dan pelatihan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Terdapat koordinator yang tidak bisa hadir secara luring karena sudah memiliki agenda kegiatan di luar jakarta 2. Renstra unit kerja dalam proses finalisasi karena, pengesahan renstra kemendikbud yang baru disahkan di bulan Maret 2022.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Rapat dilakukan secara blended (daring dan luring) dengan menggunakan media zoom meeting. 2. Dilakukan reviu renstra untuk segera difinalkan di triwulan 3 mengacu pada renstra dirjen pendidikan vokasi dan renstra kemendikbud.</p> <p><b>TW3 : Progress / Kegiatan :</b>  1. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi antar pimpinan di unit kerja direktorat kursus dan pelatihan di setiap awal bulan dan triwulan secara luring. 2. Finalisasi Renstra Direktorat Kursus dan Pelatihan 2020 - 2024</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1) Rapat koordinasi pimpinan sulitnya menemukan waktu untuk melakukan rapat koordinasi disebabkan karena kesibukan di masing-masing pokja 2. Proses reviu renstra memerlukan pengecekan kembali secara mendetail.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1) Rapat koordinasi pimpinan dilakukan secara blended (daring dan luring). 2. Finalisasi renstra direktorat kursus dan pelatihan: melibatkan para tenaga teknis yang berasal dari akademisi.</p> <p><b>TW4 : Progress / Kegiatan :</b>  1) Di bulan oktober, dilakukan evaluasi capaian output triwulan 3 2) Di bulan november, dilakukan kegiatan revisi/penyesuaian program kerja tahun 2022 3) Rapat koordinasi pimpinan bulan oktober dan november dilaksanakan secara luring 4) Di bulan november, dilakukan penyusunan rencana umum pengadaun tahun 2023</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1) Padatnya materi dari narasumber menyebabkan penginputan data capaian tidak bisa dilakukan di tempat</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1) Penyelesaian tugas penginputan data dilakukan secara mandiri kemudian dilakukan pembahasan ulang karena adanya tambahan materi dari narasumber</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kursus dan Pelatihan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kursus dan Pelatihan	Nilai	93.5	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 93.5</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : -</b> <b>TW4 : 98.87</b>	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Melakukan pengukuran serta penginputan data kinerja anggaran dan capaian output di setiap awal bulan berikutnya pada aplikasi simproka, spasikita, dan SAKTI. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Terlambatnya sosialisasi metode penghitungan dari KPPN sehingga terdapat item penilaian yang menjadi target penghitungan tetapi tidak mencapai nilai maksimal. 2. Target sasaran di aplikasi SAKTI masih mengacu pada DIPA AWAL. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Melakukan antisipasi dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan setiap minggu sehingga nilai NKA bisa ditingkatkan 2. Memberikan penjelasan pada pelaporan capaian output di aplikasi SAKTI. <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Melakukan pengukuran serta penginputan data kinerja anggaran dan capaian output di setiap awal bulan berikutnya pada aplikasi simproka, spasikita, dan SAKTI. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Target sasaran di aplikasi SAKTI mengacu pada DIPA BA-BUN. 2. Adanya perubahan format kegiatan disebabkan adanya keterbatasan anggaran. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Melakukan antisipasi dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan setiap minggu sehingga nilai NKA bisa ditingkatkan 2. Memberikan penjelasan pada pelaporan capaian output di aplikasi SAKTI. <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1). Melakukan analisis kinerja bulan juli - september serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA) 2). Melakukan evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan agustus - oktober 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan agustus - oktober pada aplikasi SAKTI. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1). Analisis kinerja bulan juli - september serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA): 2). Evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan agustus - oktober: 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan agustus - oktober pada aplikasi SAKTI: <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1). Analisis kinerja bulan juli - september serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA): 2). Evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan agustus - oktober: 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan agustus - oktober pada aplikasi SAKTI: <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1). Melakukan analisis kinerja bulan oktober - desember serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA) 2). Melakukan evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan oktober - desember 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan november - desember pada aplikasi SAKTI. 4). Revisi penyesuaian anggaran <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1). Analisis kinerja bulan oktober - desember serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA): 2). Evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan oktober - desember 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan november - desember pada aplikasi SAKTI 4). Tidak ada kendala/permasalahan anggaran <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1). Analisis kinerja bulan oktober - desember serta menginput pada aplikasi kinerja (SPASIKITA): 2). Evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan menginput pada aplikasi SIMPROKA di awal bulan oktober - desember 3). Menginput capaian output (IKPA) di awal bulan november - desember pada aplikasi SAKTI 4). Tidak ada strategi/tindak lanjut anggaran
---	---	---	-------	------	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
<b>1</b>	<b>Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri</b>	<b>100.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	663	917	931	<b>Rp. 10.842.225.000</b>
2	[057] Penyusunan SKL dan Kurikulum			0	26	46	46	Rp. 3.580.186.000
3	[058] Pembentukan Master Penguji Penguji LSK dan TUK			136	302	345	359	Rp. 1.276.188.000
4	[059] Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan berbasis industri			0	633	941	941	Rp. 5.985.851.000
<b>5</b>	<b>Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja</b>	<b>30000.0000</b>	<b>Orang</b>	7240	20006	40952	41722	<b>Rp. 131.486.430.000</b>
6	[U51] Penyusunan dan Penggandaan Pedoman Kurikulum Bahan ajar			1	1	1	26	Rp. 139.196.000
7	[U52] Sosialisasi Koordinasi Penyelenggara Program PKK			2	2	2	2	Rp. 242.540.000
8	[U53] Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKK			1	5	9	10	Rp. 1.019.130.000
9	[U54] Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKK			0	3	7	9	Rp. 1.224.383.000
10	[U55] Pemberian bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja			7240	20006	40952	41722	Rp. 127.500.000.000
11	[U56] Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKK			0	0	56	108	Rp. 249.309.000
12	[U57] Verifikasi dan pengolahan Laporan			0	0	103	581	Rp. 541.100.000
13	[U58] Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan			3	6	9	11	Rp. 271.872.000
14	[U59] Penyusunan penggandaan dan sosialisasi Best Practice PKK			0	0	0	3	Rp. 298.900.000
<b>15</b>	<b>Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha</b>	<b>19896.0000</b>	<b>Orang</b>	2740	14411	21993	22063	<b>Rp. 124.471.866.000</b>
16	[U51] Penyusunan dan Penggandaan Pedoman Kurikulum Bahan ajar			1	1	1	2	Rp. 120.000.000
17	[U52] Sosialisasi Koordinasi Penyelenggara Program PKW			1	2	2	2	Rp. 119.500.000
18	[U53] Penilaian dan Penetapan Proposal Penyelenggara Program PKW			1	5	9	9	Rp. 1.193.679.000
19	[U54] Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Program PKW			7	12	18	19	Rp. 2.186.334.000
20	[U55] Pemberian Bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha			2740	14411	21993	22063	Rp. 119.376.000.000
21	[U56] Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program bantuan PKW			0	17	45	45	Rp. 451.612.000
22	[U57] Verifikasi dan pengolahan Laporan			0	0	0	432	Rp. 374.375.000
23	[U58] Manajemen dukungan pengelolaan Program bantuan			3	6	9	12	Rp. 327.600.000
24	[U59] Penyusunan penggandaan dan sosialisasi Best Practice PKW			0	0	0	6	Rp. 322.766.000
<b>25</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0.249	0.498	0.747	2.83	<b>Rp. 6.210.180.000</b>
26	[051] Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran			2	4	6	15	Rp. 1.417.064.000
27	[052] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan			2	4	6	14	Rp. 1.229.224.000
28	[054] Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan			2	4	7	15	Rp. 1.257.818.000
29	[058] Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			0	2	5	5	Rp. 741.375.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

30	[059] Pelayanan Umum			3001	4002	11559	11559	Rp. 1.564.699.000
<b>31</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0.249	0.498	0.747	1.913	<b>Rp. 17.142.940.000</b>
32	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 8.778.533.000
33	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 8.364.407.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 290.153.641.000</b>

Jakarta,12 Januari 2023

**Direktur Kursus dan Pelatihan,**



**Wartanto**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU  
DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

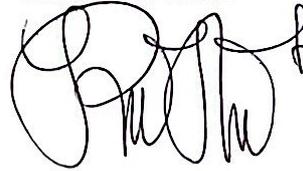
Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 20 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Kusti Herryawan, S.T.

197610292002121004



**Direktorat Kursus dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Tahun 2022**

**KONTAK KAMI**

KursusKita



Direktorat Kursus dan Pelatihan



@kursuskita



@kursuskita



[kursus.kemdikbud.go.id](https://kursus.kemdikbud.go.id)

